



# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA**

**KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

Jl. Terpadu, Selatpanjang  
Telp. (0763) 8001555 / Fax. (0763) 8001555  
Website : [dinsos.merantikab.go.id](http://dinsos.merantikab.go.id)

## KATA PENGANTAR

**P**uji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia serta ridhoNya, Rencana Strategis (RENSTRA) 2025-2029 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti dapat disusun dengan baik. Penyusunan Renstra telah melewati berbagai tahapan kegiatan mulai dari penyiapan tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang telah diselaraskan dengan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti dan telah melakukan Forum Renstra Listas Perangkat Daerah.

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2025-2029 disusun sebagai acuan bagi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dalam mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti 2025-2029 yaitu untuk “Menjadikan Kabupaten Kepulauan Meranti Unggul, Agamis dan Sejahtera”, khususnya dalam mendukung misi keempat yaitu Memperkuat mutu, Layanan dan Jaminan Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Masyarakat dan Meningkatkan Tenaga Kerja sesuai Kebutuhan Industri, Kewirausahaan dan Birokrasi.

Akhirnya saya sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Selatpanjang, 5 November 2025

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan  
Keluarga Berencana

Kabupaten Kepulauan Meranti



**ROKHAIZAL, S.Pd., M.Pd**

**PEMBINA UTAMA MUDA / (IV.C)**

**NIP. 19700302 199304 1 001**

## DAFTAR ISI

Cover

Perbub Renstra 2025-2029

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iv
Daftar Gambar .....	v
 BAB I    PENDAHULUAN .....	 1
1. Latar Belakang .....	1
2. Landasan Hukum .....	3
3. Maksud dan Tujuan.....	7
4. Sistematika Penulisan .....	8
 BAB II    GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS SOSIALPPPAPPKB .....	  10
1. Gambaran Pelayanan .....	10
a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	10
b. Sumber Daya.....	13
c. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan.....	17
d. Kelompok Sasaran Layanan .....	28
e. Mitra Perangkat Daerah Dalam Memberikan Pelayanan.....	29
2. Permasalahan dan Isu Strategis.....	32
a. Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	32
b. Isu Strategis.....	36
 BAB III    TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	 37
1. Tujuan .....	37
2. Sasaran .....	38
3. Strategi .....	41
4. Arah Kebijakan .....	42
 BAB IV    PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	  50
1. Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan .....	50

2.	Subkegiatan Prioritas Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah .....	85
3.	Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029 melalui Indikaotr Kinerja Utama (IKU) .....	95
4.	Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) .....	97
BAB V	PENUTUP.....	106

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	13
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan.....	14
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan .....	14
Tabel 2.4	Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di DinsosPPPAPPKB .	15
Tabel 2.5	Sasaran Penyelenggaraan Pelayanan .....	17
Tabel 2.6	Pencapaian Tujuan dan Sasaran (Renstra Periode Lalu) .....	19
Tabel 2.7	Pencapaian Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Urusan (Renstra Periode Lalu) .....	20
Tabel 2.8	Capaian Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SMP) (Renstra Periode Lalu) .....	23
Tabel 2.9	Anggaran dan Realisasi Pendanaan .....	26
Tabel 2.10	Mitra Kerja DinsosPPPAPPKB .....	30
Tabel 2.11	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah .....	33
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran.....	39
Tabel 3.2	Penahapan Renstra.....	41
Tabel 3.3	Teknik Merumuskan Arah kebijakan .....	42
Tabel 3.4	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan .....	45
Tabel 4.1	Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan.....	51
Tabel 4.2	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah .....	85
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	96
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Kunci (IKK) .....	98
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	101

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Konsep Penyusunan Renstra.....	2
Gambar 2.1 Struktur Organisasi .....	12
Gambar 3.1 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra .....	37

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra; (2) Penyusunan rancangan Awal Renstra; (3) Penyusunan Rancangan, (4) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (5) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra; dan (6) penetapan Renstra.

Renstra memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra Dinsos PPPAPPKB dengan RPJMD, Renstra Kementerian PPPA, Renstra BKKBN, Renstra Kementerian Sosial, Renstra Dinas Sosial Provinsi Riau, Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau serta dengan Renja diuraikan sebagai berikut:

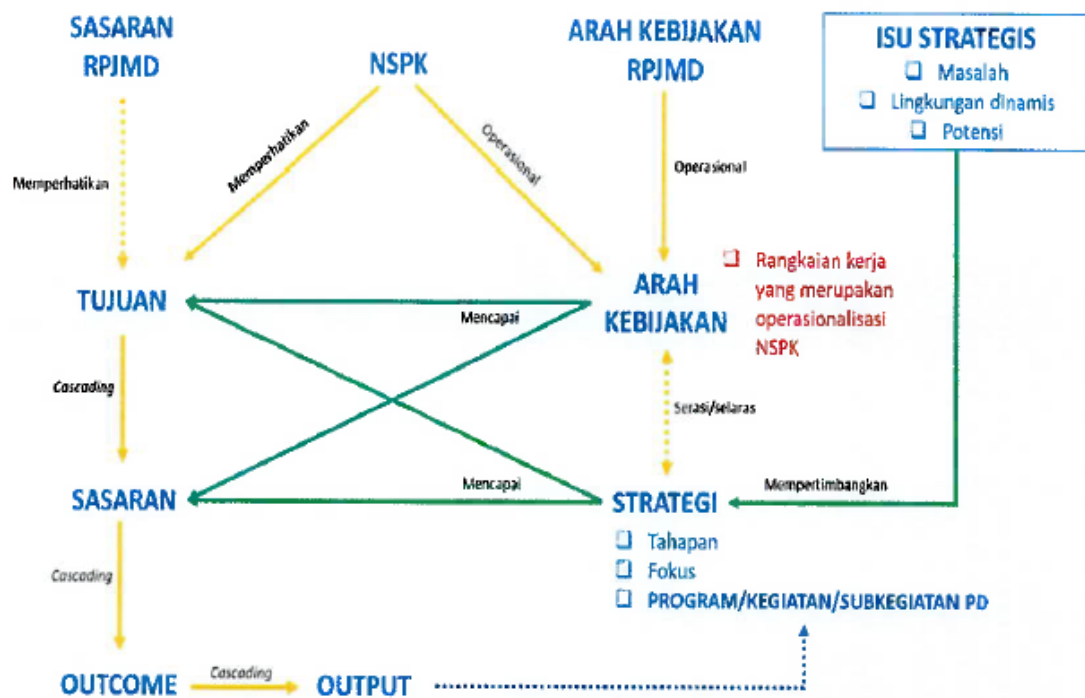
- a. Penyusunan Renstra mengacu pada tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Kepulauan Meranti, Peraturan Bupati (PERBUP) Kepulauan Meranti No. 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti, RPJPD Kabupaten Kepulauan Meranti, RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2025-2029 dan memperhatikan Renstra Kementerian Sosial, Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Renstra BKKBN, Renstra Dinas Sosial Provinsi Riau, Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD

Kabupaten Kepulauan Meranti.

- b. Renstra disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja Renstra periode sebelumnya dan memperhatikan masukan dari stake holder serta Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Lainnya.

Konsep Penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos PPPAPKB) dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

**Gambar 1.1**  
**Konsep Penyusunan Renstra Dinas SOSIALP3AP2KB**  
**Kabupaten Kepulauan Meranti**



Sumber : Imendagri No.2 Tahun 2025

Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti.



## 2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undangn 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4) ;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29);
10. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
  12. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
  13. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2024-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  19. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  20. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

21. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
22. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
28. Peraturan Menteri Sosial Nomor No. 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
29. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);

30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Nomor );
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti 2 Nomor Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2025 Nomor 2);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 5);
34. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2015 Nomor 12);
35. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 Nomor 9);
36. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 Nomor 4);
37. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti No. 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 Nomor 23);

### 3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti adalah menyediakan dokumen perencanaan untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan Subkegiatan sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu sebagai berikut :

- 1) Merumuskan tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mendukung Visi dan Misi Bupati;
- 2) Menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ( DinsosPPPAPPKB ) Kabupaten Kepulauan Meranti;
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

#### **4. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

##### **Bab I PENDAHULUAN**

1. Latar belakang;
2. Dasar hukum penyusunan;
3. Maksud dan tujuan;
4. Sistematika penulisan.

##### **Bab II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS SOSIALPPPAPKB**

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah :
  - a. Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah;
  - b. Sumber daya Perangkat Daerah;
  - c. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah;
  - d. Kelompok sasaran layanan; dan
  - e. Mitra Perangkat Daerah Dalam Memberikan Pelayanan.
2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah :
  - a. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah; dan
  - b. Isu Strategis.

##### **Bab III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

1. Tujuan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2025-2029;
2. Sasaran Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2025-2029;
3. Strategi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029;
4. Arah Kebijakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029.

#### **Bab IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

1. Uraian Program;
2. Uraian Kegiatan;
3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025-2029 melalui Indikaotr Kinerja Utama (IKU);
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

#### **Bab V PENUTUP**

Bab ini memuat Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS SOSIALPPPAPPKB**

#### **1. Gambaran Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

##### **a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Kepulauan Meranti No. 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan Kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b) Pelaksanaan Kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

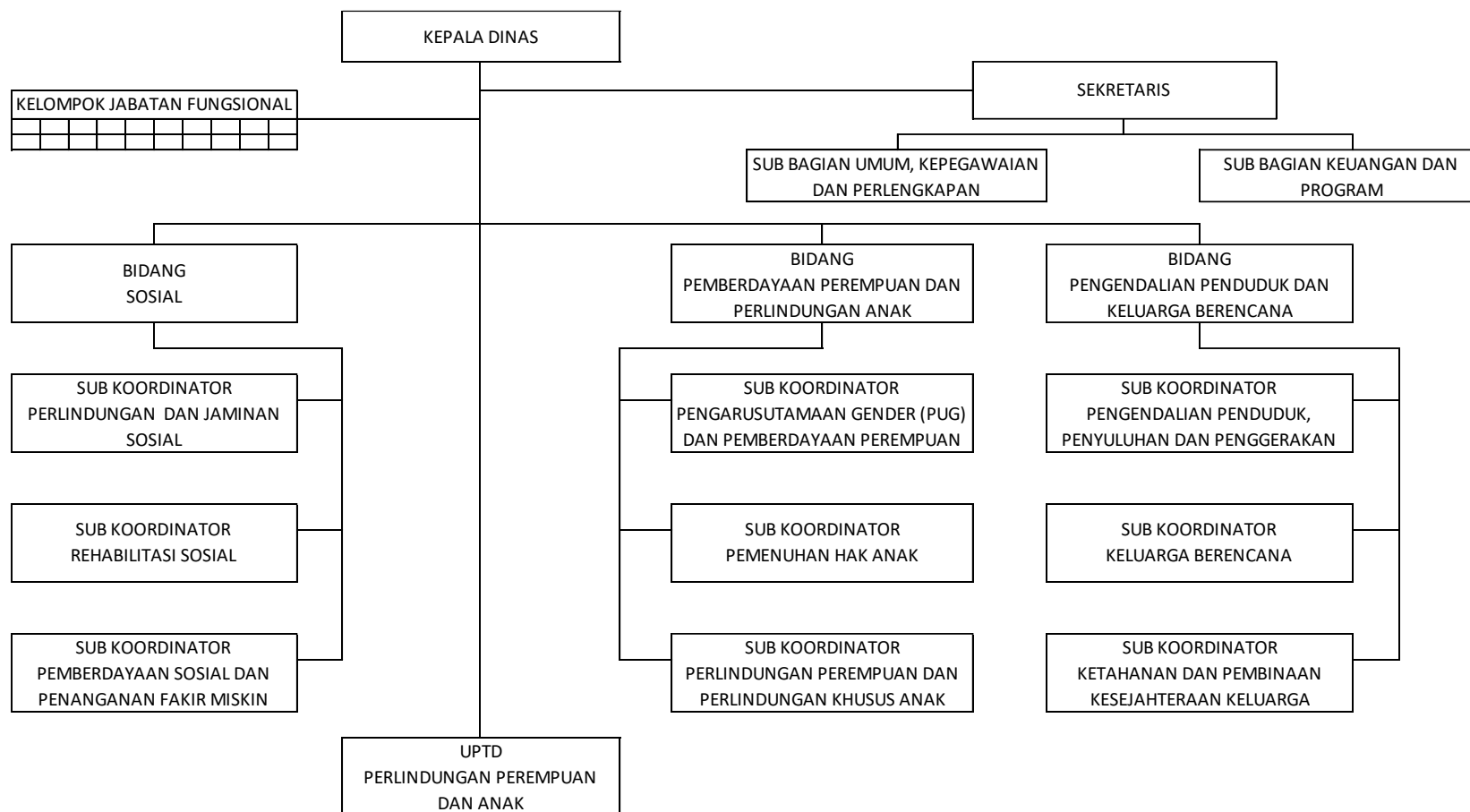
Untuk menjalankan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Peraturan Bupati No. 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti, adapun susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- a) Kepala Dinas
- b) Sekretariat, terdiri dari;



1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Perlengkapan;
  2. Sub Bagian Keuangan Dan Program.
- c) Bidang Sosial, terdiri dari:
1. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perlindungan dan jaminan Sosial;
  2. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Rehabilitasi Sosial;
  3. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.
- d) Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, terdiri dari:
1. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan;
  2. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pemenuhan Hak Anak;
  3. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak.
- e) Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, terdiri dari:
1. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
  2. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Keluarga Berencana;
  3. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Ketahanan dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga.
- f) Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
- g) Kelompok Jabatan Fungsional.

**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,**  
**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**



*Sumber : Sub bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan*

b. Sumber Daya

Suatu Organisasi atau Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukungnya. Sumber daya manusia serta sarana dan prasarana perkantoran tersebut merupakan elemen penting dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap peningkatan kinerja organisasi.

Adapun berdasarkan data per Agustus Tahun 2025, jumlah Aparatur pada dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu sebanyak 75 orang yang terdiri dari 21 orang PNS dan 54 orang honorer yang dirinci menurut tingkat pendidikan, jenis kelamin, golongan serta jabatan yang dapat dilihat melalui tabel di bawah ini :

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**  
**Tahun 2025**

No.	Tingkat Pendidikan	PNS			Honorer		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	SD	-	-	-	2	1	3
2	SMP Sederajat	-	-	-	-	-	-
3	SMA Sederajat	-	-	-	8	7	15
4	D II	-	-	-	1	-	1
5	D III	1	2	3	3	3	6
6	S 1	9	6	15	7	22	29
7	S 2	3	-	3	-	-	-
8	S 3	-	-	-	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>33</b>	<b>54</b>

Sumber : Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan

Dari tabel 1 diatas, dapat dilihat bahwa pegawai laki-laki sebesar 45% sedangkan pegawai perempuan sebesar 55% dari total keseluruhan pegawai. Selanjutnya untuk tingkat pendidikan terendah yaitu sebesar 4% dari jumlah seluruh pegawai dengan tingkat pendidikan SD dan tingkat Pendidikan tertinggi sebesar 4% dari jumlah keseluruhan pegawai dengan tingkat pendidikan S2.

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan**  
**Tahun 2025**

No.	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Golongan II	-	-	-
2	Golongan III	11	8	19
3	Golongan IV	2	-	2
	<b>JUMLAH</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>21</b>

*Sumber : Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan*

Jika dilihat dari tabel 2 diatas, dapat diketahui bahwa pegawai golongan III pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar 90% dan Pegawai Golongan IV sebesar 10% dari total jumlah PNS yang ada.

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan**  
**Tahun 2025**

No.	Eselon	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Eselon II	1	-	1
2	Eselon III	2	1	3
3	Eselon IV	2	2	4
4	Fungsional Tertentu	-	1	1
5	Pelaksana	8	4	12
	<b>JUMLAH</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>21</b>

*Sumber : Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Perlengkapan*

Selanjutnya jika dilihat dari tabel 3 diatas, PNS yang menduduki jabatan struktural sebesar 38%, jabatan fungsional tertentu 5% dan jabatan pelaksana 57% dari total Jumlah PNS yang ada.

Memperhatikan kondisi sebagaimana tersebut diatas, jika dilihat dari total kebutuhan aparatur yaitu sebanyak 79 jabatan sesuai dokumen Analisis Jabatan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga. Maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengalami kekurangan Aparatur Sipil Negara karena hanya 27% jabatan yang terisi dari total jabatan yang dibutuhkan. Dimana dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah

Perangkat Daerah yang mengampu 3 Urusan Pemerintahan ditambah lagi dengan minimnya jumlah jabatan fungsional yang terisi tentunya ini dapat mengganggu kinerja Organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi yang di emban. Selain itu beberapa hal yang perlu di perhatikan guna meningkatkan kinerja pelayanan organisasi yaitu :

1. Peningkatan kapasitas SDM sesuai dengan tugas dan fungsi;
2. Penambahan SDM untuk mendukung urusan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
3. Peningkatan wawasan dengan penyediaan peralatan yang mendukung;
4. Peningkatan kapasitas penggunaan teknologi informasi.
5. Peningkatan kompetensi ASN sesuai dengan tugas dan fungsi.

Selain sumber daya manusia, sarana dan prasarana juga merupakan hal yang sangat penting dalam menopang penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti. Sarana prasarana memberikan kontribusi bagi pencapaian kinerja organisasi serta kinerja aparatur. Adapun Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki sarana prasarana sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.4**  
**Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di DinsosP3AP2KB**  
**Kabupaten Kepulauan Meranti**  
**Tahun 2025**

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Gedung Utama	1	-	1
2	Gedung Aula	1	-	1
3	Pertemuan	1	-	1
4	Gedung Asrama Pelajar KAT	1	-	1
5	Taman Makam Pahlawan	1	-	1
6	Gedung TAGANA	1	-	1
7	Gedung UPPKH	1	-	1
8	Mushola	1	-	1
9	Mobil Avanza	1	-	1
10	Mobil Antar Jemput Akseptor	1	-	1
11	Kendaraan Bermotor Roda 2	21	-	21

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
12	Kamera digital	1	3	4
13	Kamera conference	1	-	1
14	Mesin Tempel (mesin speedboat)	-	1	1
15	Komputer/ P.C. Unit	43	18	61
16	Laptop	15	7	22
17	Printer	34	41	75
18	Proyektor	20	4	24
19	Mesin Fotocopy	-	1	1
20	AC	14	21	35
21	Kipas Angin	-	39	39
22	Sound system	3	4	7
23	Gedung BLK	1	-	1
24	Gedung Alokon	1	-	1
25	Balai Penyuluhan KB	9	-	9
26	Dispenser	-	5	5
27	Mesin Air	2	1	3
28	Mesin Potong Rumput	3	3	6
29	Mesin Genset	2	-	2
30	Meja rapat	5	-	5
31	Meja ½ biro	15	15	30
32	Kursi Putar	16	19	35
33	Sofa	-	10	10
34	Kursi Rapat	20	-	20
35	Lemari Arsip	8	-	8
36	Lemari Besi	13	9	22
37	Televisi	2	4	6
38	Terminal (Antena Parabola) Internet	9	-	9
39	Alat Penghancur Kertas	-	3	3
40	Handycam	-	2	2
41	Facsimile	-	6	6
42	Telephone Mobile Tab A6	-	5	5
43	Hardisk Eksternal	4	4	8
<b>JUMLAH</b>		<b>272</b>	<b>225</b>	<b>497</b>

Sumber : Pengurus Barang

Dari tabel sarana dan prasarana diatas, dapat dilihat bahwa banyak sarana dan prasarana pada Dinas, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam kondisi rusak baik itu rusak ringan maupun rusak berat. Adapun dari total unit sarana dan prasarana yang berjumlah 497 unit, diketahui sebanyak 54,73% dalam kondisi baik sedangkan 45,27% dalam kondisi rusak sehingga perlu adanya penambahan atau perbaikan sarana dan prasarana untuk 5 tahun kedepan guna menunjang pencapaian kinerja organisasi.

c. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Sebagai komitmen dalam pelaksanaannya telah ditetapkan indikator dan target kinerja sebagai ukuran keberhasilan. Adapun yang menjadi sasaran dalam Penyelenggaraan pelayanan pada dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.5**  
**Sasaran Penyelenggaraan Pelayanan**

No.	Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Jumlah
1	Anak Balita Terlantar	1
2	Anak Terlantar	27
3	Anak yang berhadapan dengan Hukum	29
4	Anak Jalanan	-
5	Anak dengan kedisabilitas	-
6	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau di berlakukan salah	32
7	Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	15
8	Lanjut Usia Terlantar	1.078
9	Penyandang Disabilitas	1.324
10	Tuna Susila	-
11	Gelandangan	4
12	Pengemis	3
13	Pemulung	2
14	Kelompok Minoritas	-
15	Bekas warga Binaan Lembaga Perasyarakatan	2
16	Orang dengan HIV/AIDS	8
17	Korban Penyalahgunaan Nafza	13
18	Korban Trafficking	-
19	Korban tindak kekerasan	9
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	-
21	Korban Bencana Alam	1.894

<b>No.</b>	<b>Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial</b>	<b>Jumlah</b>
22	Korban Bencana Sosial	26
23	Perempuan Rawan sosial Ekonomi	-
24	Fakir Miskin	151.011
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	-
26	Komunitas Adat Terpencil	2.801
	<b>JUMLAH PPKS</b>	<b>158.270</b>
<b>No.</b>	<b>Sasaran pelayanan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>	<b>Jumlah</b>
1	Jumlah Perempuan	102.792
2	Jumlah Anak	69.790
<b>No.</b>	<b>Sasaran Pelayanan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>	<b>Jumlah</b>
1	Akseptor KB	18.647
2	Pasangan Usia Subur	28.812
3	Jumlah Keluarga	54.966

Selanjutnya dari sasaran penyelenggaraan pelayanan diatas, untuk melihat capaian target kinerja pada dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.6  
Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Kepulauan Meranti  
(Renstra Periode yang Lalu)

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Kemiskinan				24,97	25,28	24,61	22,10	19,50	25,28	25,68	23,84	22,98	23,15	98,75	94,46	88,45	96,01	81,28
2	Indeks Pembangunan Gender				86,50	86,90	87,20	87,40	87,50	86,30	86,45	86,97	87,35	87,44	99,77	99,48	99,74	99,94	99,93
3	Persentase PPKS yang tertangani				N.a	77	79	88	91	N.a	77	88	90	92	N.a	100	111,4	102,3	101,1
4	Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)				2,30	2,20	2,19	2,18	2,17	2,39	2,20	2,22	2,19	2,22	96,08	100	98,63	99,54	97,69
5	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam Unit pelayanan terpadu				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah				9,30	9,40	9,50	9,60	9,70	10,82	9,89	7,56	9,60	9,50	116,3	105,2	79,58	100	97,94
7	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam Unit pelayanan terpadu				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Tabel 2.7  
Pencapaian Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Urusan Dinas Sosial  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Kepulauan Meranti  
(Renstra Periode yang Lalu)

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial				N.a	N.a	65,26	67,52	69,4	N.a	N.a	64,75	78,57	35,12	N.a	N.a	99,22	116,4	50,61
2	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial				N.a	N.a	75,24	77,65	79,80	N.a	N.a	47,71	73,61	76,33	N.a	N.a	63,41	94,8	95,65
5	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR				30	30	30	30	30	13,33	13,33	13,33	13,33	26,67	44,43	44,43	44,43	44,43	88,9
6	Partisipasi perempuan di lembaga swasta				51,25	53,34	55,47	57,87	59,35	28,99	32,00	35,00	33,79	40,82	56,57	59,99	63,1	58,39	68,78
7	Rasio KDRT				N.a	0,009	0,008	0,008	0,008	N.a	0,010	0,010	0,018	0,012	N.a	88,88	75,00	25,00	50,00
8	Partisipasi angkatan kerja perempuan				52,00	53,00	54,00	55,00	56,00	51,94	52,10	47,93	47,58	52,09	99,88	98,3	88,76	86,51	93,02
9	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
12	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
13	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
14	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
15	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)				1,67	1,46	1,25	1,07	0,95	1,52	2,17	2,04	0,99	0,97	109	51,37	36,80	107	97,89
16	Ratio Akseptor KB				69,36	70,23	71,45	72,32	73,57	65,95	68,64	50,59	62,62	65,40	95,08	97,74	70,8	86,59	88,89
17	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49 tahun				71,36	73,26	75,67	77,84	79,56	67,72	70,44	75,04	78,63	65,40	94,9	96,15	99,17	101,01	82,20
18	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)				20,01	18,15	16,68	14,36	12,23	23,45	26,20	17,83	19,74	13,30	82,81	55,65	93,11	62,53	91,25
19	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)				N.a	20,34	16,46	12,35	8,68	N.a	23,50	22,09	13,03	6,50	N.a	84,46	65,80	94,49	125,12
20	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				N.a	20,13	21,56	22,74	23,87	N.a	14,80	13,94	14,48	16,80	N.a	73,52	64,66	63,68	70,38
21	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB				N.a	83,34	84,56	85,26	86,72	N.a	65,29	62,36	52,14	64,20	N.a	78,34	73,75	61,15	74,03
22	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB				N.a	N.a	25,67	31,45	36,53	N.a	N.a	15,52	23,28	34,66	N.a	N.a	60,46	74,02	94,88
23	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB				N.a	N.a	N.a	12,76	13,56	N.a	N.a	N.a	4,80	6,05	N.a	N.a	N.a	37,62	44,62
24	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan				N.a	N.a	100	100	100	N.a	N.a	55,56	77,78	100,00	N.a	N.a	55,56	77,78	100
25	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa				6,50	6,60	6,70	6,80	6,90	6,33	6,33	6,44	6,55	6,55	97,38	95,91	96,12	96,32	94,93
26	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
27	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri				N.a	N.a	N.a	50,65	55,75	N.a	N.a	N.a	30,80	36,29	N.a	N.a	N.a	60,81	65,09

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
28	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan				3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,86	3,86	3,86	100	100	128,2	128,2	128,2
29	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
30	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan				100	100	100	100	100	75	75	71	71	71	75	75	71	71	71
31	Rata-rata usia kawin pertama wanita				N.a	22,10	22,00	21,80	21,60	N.a	22,20	22,50	22,70	22,40	N.a	99,55	97,73	95,87	96,30

Tabel 2.8  
Capaian Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SMP)  
Bidang Sosial  
(Renstra Periode yang Lalu)

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti				N.a	100	100	100	100	N.a	70	100	94,55	78,13	N.a	70	100	94,55	78,13
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti				N.a	100	100	100	100	N.a	70	100	95,00	69,40	N.a	70	100	95,00	69,4
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti				N.a	100	100	100	100	N.a	70	100	96,66	79,03	N.a	70	100	96,66	79,03
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti				N.a	100	100	100	100	N.a	63,33	100	88,00	95,00	N.a	63,33	100	88	95
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				N.a	100	100	100	100	N.a	70	100	96,00	92,00	N.a	70	100	96	92

Berdasarkan tabel 2.6 terkait Capaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana periode sebelumnya dapat dilihat bahwasanya rata-rata Rasio pencapaian berada diatas 95%. Sedangkan berdasarkan tabel 2.7 terkait capaian penyelenggaraan pelayanan bidang urusan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana periode sebelumnya diketahui bahwa rata-rata rasio capaian kinerja berada dia angka 85 %.

Selanjutnya untuk capaian penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) periode sebelumnya berdasarkan tabel 2.8 diatas diketahui bahwa rata-rata rasio capaian kinerja berada di angka 86%. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan pada dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

- a) Belum diberdayakannya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) secara maksimal;
- b) Belum tersedianya Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) secara lengkap dan terpilah;
- c) Pemberian bantuan Sosial yang belum tepat sasaran;
- d) Masih minimnya SDM profesional dalam penanganan rehabilitasi sosial bagi PPKS;
- e) Terbatasnya SDM terlatih dalam penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang responsive Gender ;
- f) Belum maksimalnya koordinasi, peran dan fungsi gugus tugas KLA dalam pemenuhan Hak-hak Anak ;
- g) Belum Optimalnya Lembaga dan jejaring perlindungan Perempuan dan Anak yang telah dibentuk ;
- h) Belum tersedianya tenaga ahli Psikolog, Mediator yang menangani atau melakukan pendampingan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi ;
- i) Belum tersedianya Dokumen Grand Design Kependudukan 5 Pilar ;
- j) Masih Kurangnya Kompetensi dari Kader Kelompok Kegiatan (POKTAN) yang memberikan Penyuluhan tentang 8 fungsi Keluarga ;

- k) Persepsi negatif terhadap program KB, ketakutan akan efek samping alat kontrasepsi, serta pengaruh nilai-nilai budaya dan agama yang menentang penggunaan alat kontrasepsi.

Sedangkan faktor yang mempengaruhi keberhasilan beberapa layanan baik pada urusan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maupun Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah adanya kerjasama dengan berbagai pihak dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat sehingga capaian pada layanan yang di berikan sesuai dengan target yang telah di tetapkan.

**Tabel 2.9**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinsos PPPA P2KB Kabupaten Meranti**  
**(Renstra Periode yang Lalu)**

No.	Program	Anggaran Tahun ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.922.422.017	5.436.000.000	5.517.000.000	5.416.000.000	3.765.694.814	5.222.421.000	3.763.843.648	3.134.690.220	96,00	96,07	68,22	57,88
2	Program Pemberdayaan Sosial	9.147.050	167.000.000	168.000.000	168.000.000	9.147.050	106.398.000	160.792.000	39.479.000	100,00	63,71	95,71	23,50
3	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	9.068.800	100.000.000	100.000.000	101.000.000	9.068.800	-	-	-	100,00	0,00	0,00	0,00
4	Program Rehabilitasi Sosial	26.600.300	150.000.000	150.000.000	150.000.000	24.338.300	468.112.000	174.384.000	169.193.000	91,50	312,07	116,26	112,80
5	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	345.171.650	15.971.000.000	15.839.000.000	15.906.000.000	169.913.390	2.187.522.000	2.272.907.150	1.165.048.020	49,23	13,70	14,35	7,32
6	Program Penanganan Bencana	99.998.700	163.000.000	163.000.000	163.000.000	65.544.700	51.728.000	47.360.000	115.981.000	65,55	31,73	29,06	71,15
7	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	-	100.000.000	100.000.000	101.000.000	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	159.465.250	157.000.000	158.000.000	158.000.000	156.119.250	139.635.000	139.284.000	57.493.000	97,90	88,94	88,15	36,39
9	Program Perlindungan Perempuan	52.880.000	200.000.000	200.000.000	201.000.000	52.880.000	163.735.000	361.494.142	220.338.000	100,00	81,87	180,75	109,62
10	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	-	100.000.000	100.000.000	101.000.000	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Program Pengelolaan Sistem Data gender dan Anak	-	100.000.000	100.000.000	101.000.000	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	85.106.800	125.000.000	125.000.000	125.000.000	83.825.492	294.023.000	121.476.600	41.508.000	98,49	235,22	97,18	33,21
13	Program Perlindungan Khusus Anak	571.718.300	505.000.000	505.000.000	505.000.000	247.941.800	156.233.000	270.106.000	143.265.000	43,37	30,94	53,49	28,37
14	Program Pengendalian Penduduk	495.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	493.690.500	95.900.000	124.704.390	133.597.000	99,74	47,95	62,35	66,80
15	Program Keluarga Berencana	2.874.269.055	2.600.000.000	2.700.000.000	2.801.000.000	1.565.694.549	2.386.072.000	1.989.456.000	2.051.018.329	54,47	91,77	73,68	73,22
16	Program Pemberdayaan dan Peningkatan keluarga Sejahtera (KS)	1.032.000.000	2.040.000.000	2.041.000.000	2.042.000.000	715.606.020	1.075.475.000	2.059.247.899	1.845.126.998	69,34	52,72	100,89	90,36



Berdasarkan tabel 2.9 terkait Anggaran dan Realisasi pendanaan dalam Pelayanan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk periode Renstra sebelumnya dapat di lihat bahwa rata-rata rasio capaian realisasi pendanaan berada pada 60,98%, dimana anggaran yang telah di rencanakan didalam Renstra hanya terealisasi 60,98% yang mana ini disebabkan karena tidak stabilnya keuangan daerah pada periode sebelumnya.

Adapun rata-rata rasio capaian pendanaan ini berbanding terbalik dengan rata-rata rasio capaian kinerja pelayanan, yang mana ini disebabkan karena dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melakukan kerja sama dengan berbagai pihak seperti halnya dengan BPJS, Kementerian Sosial melalui Sentra ABISEKA, dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan lain sebagainya sehingga meskipun keuangan yang tidak stabil namun pelayanan terhadap masyarakat tetap bisa di jalankan.

d. Kelompok Sasaran Layanan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai amanat yang di emban.

Adapun kelompok yang menjadi sasaran pelayanan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang terdiri dari 26 Kategori sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan pengolahan data PMKS dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yakni sebagai berikut :
  - a) Anak Balita Terlantar;
  - b) Anak Terlantar;
  - c) Anak yang berhadapan dengan Hukum;
  - d) Anak Jalanan;
  - e) Anak dengan Kedisabilitasan (ADK);
  - f) Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau di perlakukan salah;
  - g) Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus;
  - h) Lanjut Usia terlantar;
  - i) Penyandang Disabilitas;
  - j) Tuna Susila;
  - k) Gelandangan;
  - l) Pengemis;
  - m) Pemulung;
  - n) Kelompok Minoritas;
  - o) Bekas Warga Binaan Lembaga Perasyarakatan (BWBLP);
  - p) Orang dengan HIV/AIDS (ODHA);
  - q) Korban Penyalahgunaan NAPZA;
  - r) Korban Trafficking;
  - s) Korban tindak kekerasan;

- t) Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS);
  - u) Korban Bencana Alam;
  - v) Korban Bencana Sosial;
  - w) Perempuan rawan sosial ekonomi;
  - x) Fakir Miskin;
  - y) Keluarga bermasalah sosial psikologis;
  - z) Komunitas Adat Terpencil.
- 2) Perempuan terkait pemberdayaan dan perlindungan Perempuan;
  - 3) Anak terkait pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
  - 4) Akseptor KB;
  - 5) Pasangan Usia Subur (PUS);
  - 6) Keluarga terkait Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia terutama keluarga beresiko stunting.
- e. Mitra Perangkat Daerah dalam memberikan Pelayanan

Mitra kerja Adalah kolaborasi atau Kerjasama antara dua atau lebih pihak yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Hubungan mitra kerja biasanya didasarkan pada kesepakatan formal atau tidak formal, dimana setiap pihak berkontribusi dengan keahlian, sumber daya, atau kompetensi tertentu untuk saling melengkapi dan mencapai hasil yang diinginkan dimana keuntungan utama dari mitra kerja yaitu memanfaatkan keahlian dan sumber daya dari berbagai pihak yang berbeda untuk mencapai hasil yang lebih baik atau lebih efisien daripada jika bekerja secara mandiri. Selain itu, mitra kerja juga dapat membuka peluang baru, memperluas jaringan, dan menghadapi tantangan yang kompleks secara bersama-sama sehingga pelayanan yang di berikan kepada masyarakat dapat berjalan secara baik dan Profesional.

Adapun mantra kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat di jabarkan melalui tabel 2.10 dibawah ini :

Tabel 2.10  
Mitra Kerja Dinas Sosial PPPAPPKB

No.	Mitra Kerja	Uraian Kerjasama
1	BPJS Kesehatan	Pengaktifan BPJS PBI Pemda
2	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Pendampingan dan Pelayanan Kegiatan Sosial
3	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	Pelaksana Layanan Sosial
4	Pendamping PKH	Pendampingan dan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan
5	Taruna Siaga Bencana (Tagana)	Relawan Penanganan Bencana
6	Dinas Kesehatan	Melaporkan kepada Dinas Sosial terkait warga tidak mampu yang datang tanpa jaminan kesehatan
7	Kejaksaan	Merekomendasikan Anak Berhadapan Hukum untuk mengikuti program pembinaan atau Rehab
8	Pekerja Sosial	Memberikan pendampingan langsung kepada individu, keluarga, atau kelompok rentan (anak terlantar, lansia, penyandang disabilitas, korban kekerasan, dll)
9	Sentra Abiseka	Memberikan Pelayanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) seperti bantuan pemenuhan hidup layak, perawatan sosial, atau pelatihan keterampilan
10	Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau	Penanganan Psikologis Kasus Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtPA)/ Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
11	Pengadilan Agama	Konseling Psikologi Anak yang dimohonkan dalam Perkara Dispensasi Kawin
12	Yayasan Peduli Anak Intan Payung Riau	Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak
13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Anak pada Satuan Pendidikan
14	Kementerian Agama	Bimbingan Keagamaan pada Perempuan dan Anak, Korban Kekerasan

No.	Mitra Kerja	Uraian Kerjasama
15	TK Negeri Pembina Selatpanjang	Mendukung Program Perlindungan Anak
16	TK Aisyiyah Bustanul Athfal Cabang Selatpanjang	Mendukung Program Perlindungan Anak
17	SD Negeri 04 Selatpanjang Timur	Mendukung Program Perlindungan Anak
18	PIK-R OKAY SMA Negeri 2 Tebing Tinggi	Program Kemitraan PIK-R OKAY
19	Psikolog Klinis (Selaraskan)	Layanan Psikolog Client
20	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bemberikan bantuan Dana Alokasi Khusus Non-Fisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak
21	Praktik Mandiri Bidan (PMB)	Penyelenggaraan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi di Faskes dan jejaring KB
22	UPT Puskesmas	Penyelenggaraan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi di Faskes dan jejaring KB
23	Kecamatan dan KUA Se-Kab. Kepulauan Meranti	Pendampingan, Konseling, dan Pemeriksaan Kesehatan 3 (tiga) bulan pra nikah sebagai upaya pencegahan stunting dari hulu
24	PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel)	Pulsa Tim Pendamping Keluarga (TPK)
25	SMA Negeri 2 Tebing Tinggi	Pelayanan informasi dan edukasi kepada peserta didik dalam menjalankan program Generasi Berencana
26	BKKBN	Bemberikan bantuan Dana Alokasi Khusus Non-Fisik bantuan Operasional Pelayanan Keluarga Berencana

## **2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Sedangkan Isu-isu strategis baik berskala regional, provinsi, nasional, maupun internasional harus dianalisis untuk mendapatkan kerangka kebijakan atas peluang apa yang harus dimanfaatkan dan ancaman apa yang harus diantisipasi. Rumusan kebijakan inilah yang akan menjadi prioritas pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam perumusan kebijakan, hal penting yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah identifikasi permasalahan sebagai salah satu tahap dalam perumusan isu strategis. Suatu analisis permasalahan pembangunan harus menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah dengan pendalaman akar masing-masing masalah. Adapun dinamika lingkungan eksternal yang kemungkinan besar terjadi di masa yang akan datang, baik yang memberi peluang atau sebaliknya berdampak ancaman bagi masyarakat harus dikenali dengan baik sebagai bagian dari identifikasi isu-isu strategis pembangunan daerah.

### **a. Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi**

Berdasarkan analisis terhadap tugas dan fungsi serta kinerja periode sebelumnya dapat dirumuskan permasalahan pokok pada dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti. Permasalahan tersebut merupakan titik awal dalam merumuskan arah kebijakan, strategi implementasi dan penetapan indikator keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial dan pembangunan keluarga. Kolerasi antara masalah dan peta kebutuhan menjadi simpul keterkaitan sebagai landasan penyusunan arah kebijakan dan langkah operasional pelayanan yang akan di berikan.

Selanjutnya permasalahan pokok yang dapat diidentifikasi sebagai hambatan sekaligus tantangan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pada dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti yakni “Rendahnya tingkat Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Keluarga” yang mana ini dapat dilihat dari:

- 1) Indeks Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kepulauan Meranti berada pada skor 55,59. Meskipun berada pada status maju namun skor Indeks Kesejahteraan

Sosial Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan yang terendah jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Riau.

- 2) Masih adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan manusia.
- 3) Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Kepulauan Meranti berada di angka 61,51 dengan kategori berkembang dan berada pada urutan ke-11 dari 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

Dari permasalahan pokok yang teridentifikasi diatas, kemudian dilakukan pemetaan untuk menemukan penyebab masalah dan akar masalah guna untuk menentukan strategi dan arah kebijakan untuk menyelesaikan masalah tersebut yang dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel. 2.11  
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran  
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Masih Rendahnya Tingkat Kesejahteraan Sosial, Pembangunan Keluarga dan Kesenjangan Gender	Masih Rendahnya Cakupan Keluarga Penerima Manfaat yang sudah mampu memenuhi kebutuhannya sendiri	Masih sedikitnya pemberdayaan dan pelatihan vokasional kemandirian ekonomi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
			Masih sedikitnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Pengembangan Kapasitas
			Masih sedikitnya orang yang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat
		Belum Optimalnya Pelayanan yang di berikan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Belum tersedianya data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) secara lengkap dan terpilah
			Pemberian bantuan Sosial yang belum tepat sasaran
			Belum terjalannya koordinasi yang baik dengan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
			Lemahnya jejaring Kerjasama (networking) dengan stakeholders

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan layanan Kesejahteraan Sosial
		Masih Adanya Kesenjangan Pembangunan Antara Laki-laki dan Perempuan	Terbatasnya SDM terlatih dalam penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang responsive Gender
			Belum Optimalnya pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
			Lemahnya kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan
		Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi	Belum optimalnya pelaksanaan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat masyarakat
			Lemahnya Kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan
		Masih Tingginya kasus Kekerasan terhadap anak	Belum maksimalnya koordinasi, peran dan fungsi gugus tugas KLA dalam pemenuhan Hak-hak Anak
			Belum terjalinnya koordinasi yang baik stakeholder terkait dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak
			Masih kurangnya kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
		Belum maksimalnya pemenuhan kebutuhan Ber-KB bagi pasangan usia subur	Belum optimalnya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal
			Masih rendahnya kesertaan pengguna Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Belum optimalnya pembinaan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya
			Masih rendahnya kompetensi tenaga pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
		Masih rendahnya Kampung Keluarga yang berkualitas mandiri	Belum tersedianya Dokumen Grand Design Kependudukan 5 Pilar
			Masih rendahnya peran serta Organisasi Kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB
			Masih kurangnya kompetensi dari kader Kelompok Kegiatan (POKTAN) yang memberikan penyuluhan tentang 8 fungsi Keluarga
			Belum adanya Strategi yang disusun guna peningkatan capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
			Masih rendahnya partisipasi mitra kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam penggerakan operasional pembinaan Program Pembangunan Keluarga
			Masih kurangnya kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga

Pemetaan permasalahan sebagaimana tabel di atas merupakan perumusan dari permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang tertuang di dalam Bab II dokumen RPJMD tahun 2025-2029 yaitu sebagai berikut :

- 1) Rendahnya capaian kinerja pelaksanaan Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta masih terbatasnya jumlah penduduk mendapatkan jaminan sosial akibat keterbatasan anggaran;

- 2) Masih kurang sarana sosial seperti panti jompo, panti asuhan dan tempat-tempat rehabilitasi yang mana sarana sosial memiliki peranan penting dalam rangka untuk menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- 3) Masih terbatasnya ruang publik yang menyediakan fasilitas untuk kaum difable dan jompo;
- 4) Indeks Pembangunan Gender (IPG) hanya tumbuh sebesar 0,34% per tahun. Tahun 2024 sebesar 87,44 lebih rendah dari IPG Provinsi Riau sebesar 89,32;
- 5) Terjadinya penurunan partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dari 12,04% tahun 2023 menjadi 9,50% tahun 2024 dengan pertumbuhan sebesar 9,03%. Serta masih rendahnya representasi perempuan yang bekerja di lembaga swasta. Angka ini rendah dapat disebabkan oleh faktor ekonomi dan status sosial perempuan yang dianggap lebih rendah daripada laki-laki. Ketergantungan perempuan terhadap laki-laki sebagai sumber pendapatan keluarga cukup tinggi;
- 6) Jumlah klinik KB naik dari 9 unit di tahun 2023 menjadi 24 unit pada tahun 2024 dengan jumlah peserta KB baru 3.065 orang. Pada tahun 2024, persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) sebesar 8,76%;
- 7) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan kebijakan keluarga berencana dilakukan dengan mengendalikan angka kelahiran dengan menggunakan alat kontrasepsi. Tujuan dari keluarga berencana untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, dengan membatasi jumlah dan jarak kelahiran anak.

b. Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Berikut merupakan isu strategis pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terkait permasalahan diatas :

- 1) Rendahnya tingkat Kesejahteraan Sosial;
- 2) Kesetaraan Gender dalam segala aspek Pembangunan;
- 3) Mewujudkan Pembangunan Keluarga yang tangguh dan berkualitas.

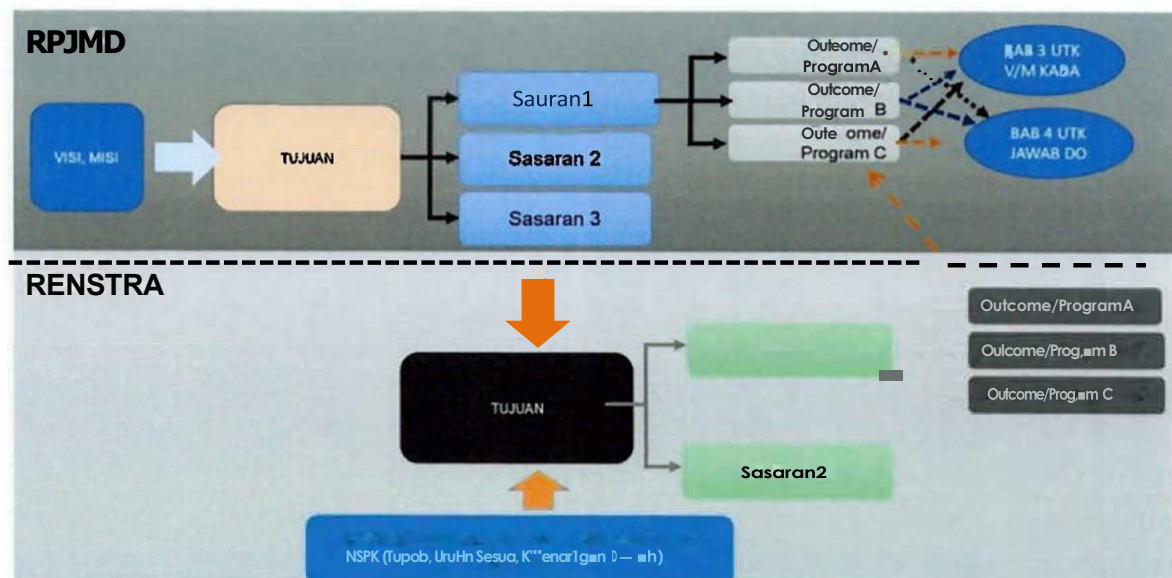
### BAB III

## TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### 1. Tujuan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2025-2029

Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Tujuan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditentukan berdasarkan Sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2025-2029 yang kerangka keterkaitannya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 3.1  
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra



Sumber : Inmendagri No.2 Tahun 2025

Jika dilihat dari gambar diatas, adapun tujuan yang ingin di capai oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk 5 tahun kedepan adalah **“Meningkatnya Kesejahteraan Sosial, Pembangunan Keluarga, Ksetaraan Gender dan Perlindungan Anak”**. yang mana ini sesuai dengan sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti Misi ke-4 yaitu :

- 1) Meningkatkan keluarga berkualitas dan kesetaraan gender;
- 2) Meningkatkan perlindungan Sosial yang Adaptif.

## **2. Sasaran Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2025-2029**

Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menetapkan sasaran yang relevan dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu sebagai berikut :

- a) Meningkatnya keluarga penerima manfaat yang sudah mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dengan indikator keberhasilan kinerjanya adalah Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan;
- b) Meningkatnya layanan penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dengan indikator keberhasilan kinerjanya adalah Persentase PPKS yang tertangani;
- c) Meningkatnya Kesetaraan Pembangunan Antara Laki-laki dan Perempuan dengan indikator keberhasilan kinerjanya adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG);
- d) Meningkatnya kesadaran Masyarakat tentang pencegahan kekerasan terhadap Perempuan dengan indikator keberhasilan kinerjanya adalah Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan);
- e) Meningkatnya Pemenuhan dan Perlindungan Khusus Anak dengan indikator keberhasilan kinerjanya adalah Indeks Perlindungan Anak (IPA);
- f) Meningkatnya Kebutuhan Ber-KB bagi Pasangan Usia Subur dengan indikator keberhasilan kinerjanya adalah Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern;
- g) Meningkatnya Pemberdayaan keluarga guna mewujudkan keluarga yang berkualitas dengan indikator keberhasilan kinerjanya adalah Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri;
- h) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja perangkat Daerah dengan indikator keberhasilan kinerjanya adalah Nilai AKIP Perangkat Daerah.

Selanjutnya untuk melihat secara lebih rinci terkait tujuan, sasaran beserta indikator dan target kinerja Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2025-2029 dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

Tabel 3.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan  
Dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Tahun 2025-2029

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN						
				SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial, Pembangunan Keluarga, Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak		Indeks Kesejahteraan Sosial (Ikesos)	Indeks	56,47	57,23	58,02	58,85	59,64	60,48
			Indeks Ketimpangan Gender (IPG)	Indeks	0,441	0,422	0,403	0,384	0,365	0,346
			Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	62,93	64,25	65,68	67,16	68,52	70,04
		Meningkatnya keluarga penerima manfaat yang sudah mampu memenuhi kebutuhannya sendiri	Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	Keluarga	30	34	40	48	58	65
		Meningkatnya layanan penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persentase PPKS Yang Tertangani	%	93	94	95	95	95	95
		Meningkatnya Kesetaraan Pembangunan Antara Laki-Laki dan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	87,78	88,06	88,34	88,62	88,91	89,04

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN						
				SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	8,43	8,15	7,84	7,46	7,05	6,58
		Meningkatnya Pemenuhan dan Perlindungan Khusus Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	64,14	65,36	66,57	67,79	69,05	70,33
		Meningkatnya kebutuhan Ber-KB bagi Pasangan Usia Subur	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	%	88,60	89,10	89,50	89,90	90,30	90,70
		Meningkatnya Pemberdayaan keluarga guna mewujudkan keluarga yang berkualitas	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri	%	48,50	49,40	50,40	51,30	52,50	53,30
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	%	71,34	72,57	73,76	74,93	76,12	77,32

### 3. Strategi dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimasiasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran renstra yang telah di tatapkan. Adapun penahapan yang dimaksud adalah prioritas tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2  
Penahapan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

<b>Tahap I (2026)</b>	<b>Tahap II (2027)</b>	<b>Tahap III (2028)</b>	<b>Tahap IV (2029)</b>	<b>Tahap V (2030)</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
Penguatan data Tunggal terintegrasi yang terupdate secara dinamis serta menyajikan data statistik populasi dari kriteria PPKS untuk mempermudah jangkauan intervensi yang tepat sasaran	Penguatan kompetensi dan tingkat kesejahteraan pilar-pilar sosial serta tim pendamping keluarga	Kolaborasi dan sinergi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan KPM Bersama dengan perangkat daerah dan stakeholder terkait	Perluasan perlindungan sosial dan kesejahteraan melalui peningkatan partisipasi Perempuan serta Peningkatan sarana prasarana layanan kesejahteraan sosial	Mewujudkan Kesejahteraan Sosial yang Inklusif dan Pembangunan Keluarga yang Berkualitas

Strategi yang akan dilaksanakan berfokus pada upaya penyelesaian permasalahan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diantaranya sebagai berikut :

- a. Penguatan kompetensi dan tingkat kesejahteraan pilar-pilar sosial;
- b. Peningkatan ketepatan sasaran serta pemanfaatan Perlindungan dan Jaminan Sosial ;
- c. Peningkatan Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
- d. Peningkatan layanan penanganan bagi korban bencana;
- e. Peningkatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan;
- f. Peningkatan kualitas keluarga dalam percepatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- g. Peningkatan perlindungan hak perempuan;
- h. Peningkatan akses pelayanan yang berkualitas bagi semua anak untuk mengoptimalkan tumbuh kembang dan kelangsungan hidupnya;
- i. Peningkatan Perlindungan Khusus Anak;
- j. Peningkatan akses dan kualitas penyelenggaraan KBKR yang komprehensif;
- k. Penguatan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
- l. Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga secara komprehensif dan integratif sesuai siklus hidup.

#### 4. Arah Kebijakan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Adapun arah kebijakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana secara umum mengacu pada arah kebijakan daerah yang dijabarkan di dalam dokumen RPJMD 2025-2029 yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3  
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	MISI	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	Ket
1	2	3	4	5
1	Memperkuat Mutu, Layanan dan Jaminan Pendidikan dan Kesehatan Serta Perlindungan Masyarakat dan Meningkatkan Kapasitas Tenaga Kerja Sesuai Kebutuhan Industri, Kewirausahaan dan Birokrasi	Penguatan kapasitas kelembagaan perempuan dan anak	Penguatan kebijakan dan regulasi, melalui penyusunan, rewi, dan koordinasi berbagai kebijakan dan regulasi pelaksanaan pengarusutamaan gender	
			Peningkatan pemahaman pemerintah, lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha tentang kesetaraan gender	
			Peningkatan akses layanan dasar yang terpadu, ramah dan inklusif bagi seluruh anak terutama bagi anak yang berada pada situasi dan kondisi khusus	



No.	MISI	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	Ket
			Peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan sesuai dengan tingkat kematangan usianya melalui peningkatan kapasitas Forum Anak daerah	
			Memperkuat kerjasama dan sinergitas antara perangkat daerah, aparat penegak hukum, lembaga layanan dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	
			Mengembangkan Sistem Layanan Komprehensif (Manajemen Kasus) yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial	
		Penguatan keluarga melalui Penyediaan layanan konseling	Penguatan pemahaman 8 fungsi keluarga	
			Peningkatan kemitraan pembangunan keluarga	
			Pengembangan dan pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dalam pengambilan kebijakan	
			Penguatan kapasitas faskes dan jaringan/jejaring yang melayani KBKR	
			Penguatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi berdasarkan siklus hidup, pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) dan peningkatan pelayanan KB Pasca Persalinan (KB PP)	
			Peningkatan penyebaran materi KIE Program Bangga Kencana sesuai segmentasi sasaran dan wilayah	

No.	MISI	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	Ket
			Peningkatan kinerja tenaga Penyuluh KB/PLKB dan pemberdayaan masyarakat melalui pergerakan kader PPKBD/Sub PPKBD	
		Peningkatan Akses Layanan Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Responsif	Penguatan dan pengembangan mekanisme insentif bagi SDM Kesos salah satunya melalui peningkatan tali asih	
			Peningkatan jumlah SDM Kesos yang tersertifikasi kompeten	
			Menguatkan kapasitas lembaga penyelenggara layanan kesejahteraan sosial melalui akreditasi dan pembinaan serta pengawasan berkelanjutan	
			Penguatan data Tunggal terintegrasi yang terupdate secara dinamis	
			Menyajikan data statistik populasi dari kriteria PPKS untuk mempermudah jangkauan intervensi yang tepat sasaran	
			Kolaborasi dan sinergi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan stakeholders	
			Pengembangan Rehabilitasi Sosial yang Efektif untuk Kesejahteraan Sosial	
		Penilaian kinerja ASN berbasis kinerja individu dan kinerja organisasi yang terukur dan akuntabel	Penguatan kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

Selanjutnya untuk melihat keterkaitan antara Visi, Misi RPJMD dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat di lihat melalui tabel di bawah ini :

Tabel 3.4  
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan  
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Tahun 2025-2029

<b>VISI : MENJADIKAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI UNGGUL, AGAMIS DAN SEJAHTERA</b>			
<b>MISI : Memperkuat Mutu, Layanan dan Jaminan Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Masyarakat, dan meningkatkan kapasitas Tenaga Kerja sesuai kebutuhan Industri, Kewirausahaan dan Birokrasi</b>			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial, Pembangunan Keluarga, Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	Penguatan kompetensi dan tingkat kesejahteraan pilar-pilar sosial	Penguatan dan pengembangan mekanisme insentif bagi SDM Kesos salah satunya melalui peningkatan tali asih
			Peningkatan jumlah SDM Kesos yang tersertifikasi kompeten
	Meningkatnya layanan penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Menguatkan kapasitas lembaga penyelenggara layanan kesejahteraan sosial melalui akreditasi dan pembinaan serta pengawasan berkelanjutan
			Penguatan data Tunggal terintegrasi yang terupdate secara dinamis
			Menyajikan data statistik populasi dari kriteria PPKS untuk mempermudah jangkauan intervensi yang tepat sasaran
			Kolaborasi dan sinergi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan stakeholders

<b>VISI : MENJADIKAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI UNGGUL, AGAMIS DAN SEJAHTERA</b>			
<b>MISI : Memperkuat Mutu, Layanan dan Jaminan Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Masyarakat, dan meningkatkan kapasitas Tenaga Kerja sesuai kebutuhan Industri, Kewirausahaan dan Birokrasi</b>			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
			Pengembangan Rehabilitasi Sosial yang Efektif untuk Kesejahteraan Sosial
		Peningkatan layanan penanganan bagi korban bencana	Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Korban Bencana Alam dan Sosial
			Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Relawan Taruna Siaga Bencana dalam Kesiapsiagaan menghadapi Bencana
	Meningkatnya Kesetaraan Pembangunan Antara Laki-Laki dan Perempuan	Peningkatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan	Penguatan kebijakan dan regulasi, melalui penyusunan, reviu, dan koordinasi berbagai kebijakan dan regulasi pelaksanaan pengarusutamaan gender
			Peningkatan pemahaman pemerintah, lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha tentang kesetaraan gender
		Peningkatan kualitas keluarga dalam percepatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak
	Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Peningkatan perlindungan hak perempuan	Memperkuat kerjasama dan sinergitas antara perangkat daerah, aparat penegak hukum, lembaga layanan dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO

<b>VISI : MENJADIKAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI UNGGUL, AGAMIS DAN SEJAHTERA</b>			
<b>MISI : Memperkuat Mutu, Layanan dan Jaminan Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Masyarakat, dan meningkatkan kapasitas Tenaga Kerja sesuai kebutuhan Industri, Kewirausahaan dan Birokrasi</b>			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
	Meningkatnya Pemenuhan dan Perlindungan Khusus Anak		Peningkatan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan
			Memperkuat kerjasama dan sinergitas antara perangkat daerah, aparat penegak hukum, lembaga layanan dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO
		Peningkatan akses pelayanan yang berkualitas bagi semua anak untuk mengoptimalkan tumbuh kembang dan kelangsungan hidupnya	Peningkatan akses layanan dasar yang terpadu, ramah dan inklusif bagi seluruh anak terutama bagi anak yang berada pada situasi dan kondisi khusus
		Peningkatan Perlindungan Khusus Anak	Peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan sesuai dengan tingkat kematangan usianya melalui peningkatan kapasitas Forum Anak daerah
			Meningkatkan pemahaman kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media massa tentang pentingnya perlindungan khusus anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah

<b>VISI : MENJADIKAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI UNGGUL, AGAMIS DAN SEJAHTERA</b>			
<b>MISI : Memperkuat Mutu, Layanan dan Jaminan Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Masyarakat, dan meningkatkan kapasitas Tenaga Kerja sesuai kebutuhan Industri, Kewirausahaan dan Birokrasi</b>			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
	Meningkatnya kebutuhan Ber-KB bagi Pasangan Usia Subur	Peningkatan akses dan kualitas penyelenggaraan KBKR yang komprehensif	Mengembangkan Sistem Layanan Komprehensif (Manajemen Kasus) yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulihan dan reintegrasi sosial
			Penguatan kapasitas faskes dan jaringan/jejaring yang melayani KBKR
			Penguatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi berdasarkan siklus hidup, pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) dan peningkatan pelayanan KB Pasca Persalinan (KB PP)
			Peningkatan penyebaran materi KIE Program Bangga Kencana sesuai segmentasi sasaran dan wilayah
			Peningkatan kinerja tenaga Penyuluh KB/PLKB dan pemberdayaan masyarakat melalui pergerakan kader PPKBD/Sub PPKBD
	Meningkatnya Pemberdayaan keluarga guna mewujudkan keluarga yang berkualitas	Penguatan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk	Pengembangan dan pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dalam pengambilan kebijakan

<b>VISI : MENJADIKAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI UNGGUL, AGAMIS DAN SEJAHTERA</b>			
<b>MISI : Memperkuat Mutu, Layanan dan Jaminan Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Masyarakat, dan meningkatkan kapasitas Tenaga Kerja sesuai kebutuhan Industri, Kewirausahaan dan Birokrasi</b>			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
		Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga secara komprehensif dan integratif sesuai siklus hidup	Penguatan pemahaman 8 fungsi keluarga
			Peningkatan kemitraan pembangunan keluarga
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja perangkat Daerah	Peningkatan akuntabilitas dan efektivitas kinerja Perangkat Daerah	Penguatan kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **1. Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan**

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi sedangkan kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

Selanjutnya yang dimaksud kerangka pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, adapun rencana Program, kegiatan, subkegiatan beserta kerangka pendanaan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat di lihat pada tabel di bawah ini :



Tabel 4.1  
Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan  
Dinas Sosial PPPA PPKB Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				7.201.176.123,00		7.564.234.929,00		7.945.196.677,00		8.344.956.508,00		8.764.454.335,00		
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.207.988.583,00		4.418.388.012,00		4.639.307.413,00		4.871.272.783,00		5.114.836.423,00		
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan aparatur, peralatan, barang dan jasa penunjang kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur, peralatan, barang dan jasa penunjang kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah (%)	81	95	4.207.988.583,00	95	4.418.388.012,00	95	4.639.307.413,00	95	4.871.272.783,00	95	5.114.836.423,00	1.06.2.08.2.14.01.00 00 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				30.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3	30.000.000,00	3	40.000.000,00	3	40.000.000,00	3	40.000.000,00	3	40.000.000,00		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	22	22		22		22		22		22			
1.06.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				15.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3	15.000.000,00	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00		
1.06.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				15.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	22	22	15.000.000,00	22	20.000.000,00	22	20.000.000,00	22	20.000.000,00	22	20.000.000,00		
1.06.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.677.857.475,00		2.734.388.012,00		2.851.307.413,00		2.899.272.783,00		2.984.836.423,00		
Terlaksananya Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	228	300	2.677.857.475,00	300	2.734.388.012,00	312	2.851.307.413,00	324	2.899.272.783,00	336	2.984.836.423,00		
1.06.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.677.857.475,00		2.734.388.012,00		2.851.307.413,00		2.899.272.783,00		2.984.836.423,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	228	300	2.677.857.475,00	300	2.734.388.012,00	312	2.851.307.413,00	324	2.899.272.783,00	336	2.984.836.423,00		
1.06.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0,00		38.000.000,00		61.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		
Terpenuhinya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	0	0,00	2	38.000.000,00	3	61.000.000,00	4	80.000.000,00	4	80.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0		10		20		25		25				
1.06.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0,00		8.000.000,00		16.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00			
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	0,00	10	8.000.000,00	20	16.000.000,00	25	20.000.000,00	25	20.000.000,00			
1.06.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0,00		30.000.000,00		45.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00			
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	0	0,00	2	30.000.000,00	3	45.000.000,00	4	60.000.000,00	4	60.000.000,00			
1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					312.407.800,00		360.000.000,00		380.000.000,00		400.000.000,00		455.000.000,00		
Terlaksananya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Uhdangan yang Disediakan (Dokumen)	8	12	312.407.800,00	12	360.000.000,00	12	380.000.000,00	12	400.000.000,00	12	455.000.000,00			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	12		12		12		12		12				
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20	39		45		50		55		62				
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	3		3		3		3		3				
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	2		2		2		2		2				
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	5		5		5		5		5				
1.06.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00			
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00			
1.06.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00			
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	5	55.000.000,00	5	55.000.000,00	5	55.000.000,00	5	55.000.000,00	5	55.000.000,00			
1.06.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				24.999.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00			
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	3	24.999.000,00	3	25.000.000,00	3	25.000.000,00	3	25.000.000,00	3	25.000.000,00			
1.06.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00			
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				2.520.000,00		5.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	8	12	2.520.000,00	12	5.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00		
1.06.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00		
1.06.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				189.888.800,00		235.000.000,00		250.000.000,00		270.000.000,00		325.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20	39	189.888.800,00	45	235.000.000,00	50	250.000.000,00	55	270.000.000,00	62	325.000.000,00		
1.06.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				145.000.000,00		30.000.000,00		105.000.000,00		145.000.000,00		160.000.000,00		
Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	1	145.000.000,00	0	30.000.000,00	0	105.000.000,00	1	145.000.000,00	0	160.000.000,00		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	25		0		10		20		20			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0		0		1		0		1			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	3		2		3		4		5			
1.06.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				45.000.000,00		0,00		0,00		45.000.000,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	1	45.000.000,00	0	0,00	0	0,00	1	45.000.000,00	0	0,00		
1.06.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		45.000.000,00		0,00		45.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	1	45.000.000,00	0	0,00	1	45.000.000,00		
1.06.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				60.000.000,00		0,00		20.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	25	60.000.000,00	0	0,00	10	20.000.000,00	20	50.000.000,00	20	50.000.000,00		
1.06.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				40.000.000,00		30.000.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00		65.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	3	40.000.000,00	2	30.000.000,00	3	40.000.000,00	4	50.000.000,00	5	65.000.000,00		
1.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				983.371.808,00		965.000.000,00		997.000.000,00		1.017.000.000,00		1.028.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	983.371.808,00	12	965.000.000,00	12	997.000.000,00	12	1.017.000.000,00	12	1.028.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
1.06.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000,00		5.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		8.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	7.000.000,00	12	7.000.000,00	12	8.000.000,00		
1.06.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				139.999.970,00		120.000.000,00		130.000.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	139.999.970,00	12	120.000.000,00	12	130.000.000,00	12	140.000.000,00	12	140.000.000,00		
1.06.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				838.371.838,00		840.000.000,00		860.000.000,00		870.000.000,00		880.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	838.371.838,00	12	840.000.000,00	12	860.000.000,00	12	870.000.000,00	12	880.000.000,00		
1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				59.351.500,00		251.000.000,00		205.000.000,00		290.000.000,00		367.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	25	28	59.351.500,00	30	251.000.000,00	32	205.000.000,00	32	290.000.000,00	35	367.000.000,00		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	0		1		1		1		1			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	60	40		40		50		60		60			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0		0		1		0		1			
1.06.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	0	0,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
1.06.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				39.351.500,00		46.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		62.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	25	28	39.351.500,00	30	46.000.000,00	32	55.000.000,00	32	55.000.000,00	35	62.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		180.000.000,00		50.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	0	0,00	1	180.000.000,00	1	50.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
1.06.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	60	40	20.000.000,00	40	20.000.000,00	50	25.000.000,00	60	30.000.000,00	60	30.000.000,00		
1.06.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		70.000.000,00		0,00		70.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	1	70.000.000,00	0	0,00	1	70.000.000,00		
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				364.400.000,00		382.620.000,00		401.751.000,00		421.838.550,00		442.930.478,00		
Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di luar Panti Rehabilitasi Sosial (%)	100	100	364.400.000,00	100	382.620.000,00	100	401.751.000,00	100	421.838.550,00	100	442.930.478,00	1.06.2.08.2.14.01.00 00 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya Dalam Pelayanan Sosial (%)	36	44		48		52		56		60			
1.06.02.2.01 - Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)				121.000.000,00		121.000.000,00		121.000.000,00		121.000.000,00		142.091.928,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Sosial terhadap Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial yang terpadu dan berkelanjutan Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	7	40	121.000.000,00	40	121.000.000,00	40	121.000.000,00	40	121.000.000,00	40	142.091.928,00		
	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	0	30		30		30		30		35			
1.06.02.2.01.0002 - Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT				96.000.000,00		96.000.000,00		96.000.000,00		96.000.000,00		110.000.000,00		
Terpenuhinya Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	0	30	96.000.000,00	30	96.000.000,00	30	96.000.000,00	30	96.000.000,00	35	110.000.000,00		
1.06.02.2.01.0004 - Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT yang terpadu dan berkelanjutan				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		32.091.928,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terpenuhinya Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial yang terpadu dan berkelanjutan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial yang terpadu dan berkelanjutan Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	7	40	25.000.000,00	40	25.000.000,00	40	25.000.000,00	40	25.000.000,00	40	32.091.928,00		
1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				243.400.000,00		261.620.000,00		280.751.000,00		300.838.550,00		300.838.550,00		
Terlaksananya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi (Lembaga)	0	0	243.400.000,00	2	261.620.000,00	2	280.751.000,00	2	300.838.550,00	2	300.838.550,00		
	Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti (Laporan)	0	0		12		12		12		12			
	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	0	9		9		9		9		9			
	Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis (orang)	0	0		101		101		101		101			
1.06.02.2.03.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				180.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	0	1	180.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
1.06.02.2.03.0013 - Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) Kewenangan Kabupaten/Kota				0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Meningkatnya peran Puskesmas sebagai layanan sosial satu pintu dan hub program graduasi	Jumlah Puskesmas desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi (Lembaga)	0	0	0,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00		
1.06.02.2.03.0014 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota				63.400.000,00		63.400.000,00		63.400.000,00		73.400.000,00		73.400.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	0	9	63.400.000,00	9	63.400.000,00	9	63.400.000,00	9	73.400.000,00	9	73.400.000,00		
1.06.02.2.03.0016 - Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial				0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial	Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti (Laporan)	0	0	0,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00		
1.06.02.2.03.0017 - Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				0,00		63.220.000,00		82.351.000,00		87.438.550,00		87.438.550,00		
Terlaksananya Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis (orang)	0	0	0,00	101	63.220.000,00	101	82.351.000,00	101	87.438.550,00	101	87.438.550,00		
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN				0,00		45.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		60.000.000,00		
Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani (Persentase)	0	0	0,00	100	45.000.000,00	100	50.000.000,00	100	55.000.000,00	100	60.000.000,00	1.06.2.08.2.14.01.00 00 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1.06.03.2.01 - Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal				0,00		45.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		60.000.000,00		
Terpenuhinya Layanan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	0,00	9	45.000.000,00	10	50.000.000,00	11	55.000.000,00	12	60.000.000,00		
1.06.03.2.01.0003 - Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal				0,00		45.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		60.000.000,00		
Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	0,00	9	45.000.000,00	10	50.000.000,00	11	55.000.000,00	12	60.000.000,00		
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				605.284.740,00		635.548.977,00		667.326.426,00		700.692.747,00		735.727.384,00		
Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase Penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut usia terlantar dan Gelandangan pengemis yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (%)	82,71	100	605.284.740,00	100	635.548.977,00	100	667.326.426,00	100	700.692.747,00	100	735.727.384,00	1.06.2.08.2.14.01.00 00 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (%)	88	100		100		100		100		100			
1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyanggang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				553.217.740,00		553.217.740,00		553.217.740,00		573.217.740,00		608.252.377,00		
Terpenuhinya Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyanggang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	7	5	553.217.740,00	5	553.217.740,00	5	553.217.740,00	5	573.217.740,00	10	608.252.377,00		
	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyanggang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	15	50		50		50		50		50			
	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	15		15		15		15		25			
	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyanggang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	6	10		10		10		10		10			
	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	191	60		60		60		60		63			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	95	50		50		50		50		62			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	10		10		10		10		10			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	8	10		10		10		10		10			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	3	10		10		10		10		10			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	22	20		20		20		20		20			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	389	1.900		1.900		1.900		2.200		2.200			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	135	50		50		50		50		50			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	3	5		5		5		5		10			
	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	10	20		20		20		20		20			
1.06.04.2.01.0001 - Penyediaan Permakanan				38.700.000,00		38.700.000,00		38.700.000,00		38.700.000,00		50.700.000,00		
Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	95	50	38.700.000,00	50	38.700.000,00	50	38.700.000,00	50	38.700.000,00	62	50.700.000,00		
1.06.04.2.01.0002 - Penyediaan Sandang				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		53.000.000,00		
Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	191	60	50.000.000,00	60	50.000.000,00	60	50.000.000,00	60	50.000.000,00	63	53.000.000,00		
1.06.04.2.01.0003 - Penyediaan Alat Bantu				47.160.000,00		47.160.000,00		47.160.000,00		47.160.000,00		47.160.000,00		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	135	50	47.160.000,00	50	47.160.000,00	50	47.160.000,00	50	47.160.000,00	50	47.160.000,00		
1.06.04.2.01.0004 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				19.750.000,00		19.750.000,00		19.750.000,00		19.750.000,00		19.750.000,00		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	8	10	19.750.000,00	10	19.750.000,00	10	19.750.000,00	10	19.750.000,00	10	19.750.000,00		
1.06.04.2.01.0005 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial				9.970.000,00		9.970.000,00		9.970.000,00		9.970.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	15	9.970.000,00	15	9.970.000,00	15	9.970.000,00	15	9.970.000,00	25	20.000.000,00		
1.06.04.2.01.0006 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat				29.970.000,00		29.970.000,00		29.970.000,00		29.970.000,00		29.970.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	15	50	29.970.000,00	50	29.970.000,00	50	29.970.000,00	50	29.970.000,00	50	29.970.000,00		
1.06.04.2.01.0008 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				11.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00		17.000.000,00		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	3	5	11.000.000,00	5	11.000.000,00	5	11.000.000,00	5	11.000.000,00	10	17.000.000,00		
1.06.04.2.01.0009 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan				66.731.000,00		66.731.000,00		66.731.000,00		86.731.000,00		86.731.000,00		
Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	389	1.900	66.731.000,00	1.900	66.731.000,00	1.900	66.731.000,00	2.200	86.731.000,00	2.200	86.731.000,00		
1.06.04.2.01.0010 - Pemberian Layanan Kedaruratan				21.700.000,00		21.700.000,00		21.700.000,00		21.700.000,00		21.700.000,00		
Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	3	10	21.700.000,00	10	21.700.000,00	10	21.700.000,00	10	21.700.000,00	10	21.700.000,00		
1.06.04.2.01.0011 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				17.450.000,00		17.450.000,00		17.450.000,00		17.450.000,00		21.454.637,00		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	7	5	17.450.000,00	5	17.450.000,00	5	17.450.000,00	5	17.450.000,00	10	21.454.637,00		
1.06.04.2.01.0012 - Pemberian Layanan Rujukan				135.356.000,00		135.356.000,00		135.356.000,00		135.356.000,00		135.356.000,00		
Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	10	20	135.356.000,00	20	135.356.000,00	20	135.356.000,00	20	135.356.000,00	20	135.356.000,00		
1.06.04.2.01.0014 - Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota				15.450.000,00		15.450.000,00		15.450.000,00		15.450.000,00		15.450.000,00		
Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	6	10	15.450.000,00	10	15.450.000,00	10	15.450.000,00	10	15.450.000,00	10	15.450.000,00		
1.06.04.2.01.0016 - Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)				79.994.000,00		79.994.000,00		79.994.000,00		79.994.000,00		79.994.000,00		
Terlaksananya Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	22	20	79.994.000,00	20	79.994.000,00	20	79.994.000,00	20	79.994.000,00	20	79.994.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1.06.04.2.01.0017 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan				9.986.740,00		9.986.740,00		9.986.740,00		9.986.740,00		9.986.740,00			
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	10	9.986.740,00	10	9.986.740,00	10	9.986.740,00	10	9.986.740,00	10	9.986.740,00			
1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				52.067.000,00		82.331.237,00		114.108.686,00		127.475.007,00		127.475.007,00			
Terpenuhinya Layanan Rehabilitasi Sosial Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	52.067.000,00	5	82.331.237,00	5	114.108.686,00	5	127.475.007,00	5	127.475.007,00			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	57	0				100				100			100	
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	2	0				3				3			3	
	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	0				0				20			20	
	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	57	40				40				45			55	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0				0				1			1	
1.06.04.2.02.0001 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan				0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00			
Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	57	0	0,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00			
1.06.04.2.02.0002 - Pemberian Layanan Kedaruratan				0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00			
Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	0,00	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00			
1.06.04.2.02.0009 - Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak				0,00		0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	0,00	0	0,00	20	10.000.000,00	20	10.000.000,00	20	10.000.000,00		
1.06.04.2.02.0010 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	2	0	0,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00		
1.06.04.2.02.0013 - Pemberian Layanan Rujukan				52.067.000,00		52.331.237,00		59.108.686,00		72.475.007,00		72.475.007,00		
Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	57	40	52.067.000,00	40	52.331.237,00	45	59.108.686,00	55	72.475.007,00	55	72.475.007,00		
1.06.04.2.02.0014 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota				0,00		0,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00		
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				1.647.399.800,00		1.729.769.790,00		1.816.258.280,00		1.907.071.193,00		2.002.424.753,00		
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	62	70	1.647.399.800,00	75	1.729.769.790,00	80	1.816.258.280,00	85	1.907.071.193,00	90	2.002.424.753,00	1.06.2.08.2.14.01.00 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1.06.05.2.01 - Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar				0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Anak-anak terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	6	0	0,00	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00		
	Jumlah Anak yang terfasilitasi dalam Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi (Orang)	2	0		3		3		3		3			
1.06.05.2.01.0002 - Rujukan Anak-Anak Terlantar				0,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Rujukan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	6	0	0,00	5	15.000.000,00	5	15.000.000,00	5	15.000.000,00	5	15.000.000,00		
1.06.05.2.01.0004 - Fasilitasi Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi				0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terfasilitasinya Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	Jumlah Anak yang terfasilitasi dalam Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi (Orang)	2	0	0,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00		
1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				1.647.399.800,00		1.704.769.790,00		1.791.258.280,00		1.882.071.193,00		1.977.424.753,00		
Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	1.647.399.800,00	10	1.704.769.790,00	10	1.791.258.280,00	10	1.882.071.193,00	10	1.977.424.753,00		
	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	5.000	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000			
	Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha Lintas Daerah (Orang)	0	0		6		10		10		10			
	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	3	100		100		100		100		100			
	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	0		0		30		55		70			
	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)	10.000	10.000		10.000		10.000		13.000		14.000			
1.06.05.2.02.0001 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				935.399.800,00		935.399.800,00		935.399.800,00		935.399.800,00		985.399.800,00		
Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	5.000	5.000	935.399.800,00	5.000	935.399.800,00	5.000	935.399.800,00	5.000	935.399.800,00	5.000	985.399.800,00		
1.06.05.2.02.0004 - Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat				600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	3	100	600.000.000,00	100	600.000.000,00	100	600.000.000,00	100	600.000.000,00	100	600.000.000,00		
1.06.05.2.02.0006 - Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga				0,00		0,00		56.488.490,00		97.301.403,00		122.654.963,00		
Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	0,00	0	0,00	30	56.488.490,00	55	97.301.403,00	70	122.654.963,00		
1.06.05.2.02.0008 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				112.000.000,00		112.000.000,00		112.000.000,00		162.000.000,00		182.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)	10.000	10.000	112.000.000,00	10.000	112.000.000,00	10.000	112.000.000,00	13.000	162.000.000,00	14.000	182.000.000,00		
1.06.05.2.02.0009 - Fasilitas Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin				0,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Terpenuhinya Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	0,00	10	15.000.000,00	10	15.000.000,00	10	15.000.000,00	10	15.000.000,00			
1.06.05.2.02.0010 - Fasilitasi bantuan stimulan modal usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Kabupaten/Kota				0,00		42.369.990,00		72.369.990,00		72.369.990,00		72.369.990,00			
Terlaksananya fasilitasi bantuan stimulan modal usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha Lintas Daerah (Orang)	0	0	0,00	6	42.369.990,00	10	72.369.990,00	10	72.369.990,00	10	72.369.990,00			
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA				276.103.000,00		289.908.150,00		304.403.558,00		319.623.735,00		335.604.922,00			
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	100	100	276.103.000,00	100	289.908.150,00	100	304.403.558,00	100	319.623.735,00	100	335.604.922,00	1.06.2.08.2.14.01.00 00 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial (%)	100	100		100		100		100		100				
1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				236.103.000,00		249.908.150,00		249.908.150,00		249.908.150,00		249.908.150,00			
Terpenuhinya Kebutuhan Dasar bagi Korban Bencana Alam dan Sosial	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	236.103.000,00	3	249.908.150,00	3	249.908.150,00	3	249.908.150,00	3	249.908.150,00			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	97	90		90		90		90		90				
	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	0		3		3		3		3				
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	25	100		100		100		100		100				
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	35		35		35		35		35		35		
1.06.06.2.01.0001 - Penyediaan Makanan				130.123.000,00		130.123.000,00		130.123.000,00		130.123.000,00		130.123.000,00			
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	97	90	130.123.000,00	90	130.123.000,00	90	130.123.000,00	90	130.123.000,00	90	130.123.000,00			
1.06.06.2.01.0002 - Penyediaan Sandang				96.000.000,00		96.000.000,00		96.000.000,00		96.000.000,00		96.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	25	100	96.000.000,00	100	96.000.000,00	100	96.000.000,00	100	96.000.000,00	100	96.000.000,00		
1.06.06.2.01.0004 - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan				9.980.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	35	9.980.000,00	35	10.000.000,00	35	10.000.000,00	35	10.000.000,00	35	10.000.000,00		
1.06.06.2.01.0005 - Pelayanan Dukungan Psikososial				0,00		6.785.150,00		6.785.150,00		6.785.150,00		6.785.150,00		
Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	0,00	3	6.785.150,00	3	6.785.150,00	3	6.785.150,00	3	6.785.150,00		
1.06.06.2.01.0007 - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi				0,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		
Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	0,00	3	7.000.000,00	3	7.000.000,00	3	7.000.000,00	3	7.000.000,00		
1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				40.000.000,00		40.000.000,00		54.495.408,00		69.715.585,00		85.696.772,00		
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dan Relawan Taruna Siaga Bencana dalam Kesiapsiagaan menghadapi Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	29	29	40.000.000,00	29	40.000.000,00	29	54.495.408,00	29	69.715.585,00	29	85.696.772,00		
	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai (Keluarga)	0	0		0		2		2		2			
	Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi (Orang)	0	0		0		0		10		19			
1.06.06.2.02.0002 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	29	29	40.000.000,00	29	40.000.000,00	29	40.000.000,00	29	40.000.000,00	29	40.000.000,00		
1.06.06.2.02.0006 - Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana				0,00		0,00		0,00		15.220.177,00		31.201.364,00		
Meningkatnya Kompetensi Tagana Dalam Penanganan Bencana	Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi (Orang)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	15.220.177,00	19	31.201.364,00		
1.06.06.2.02.0007 - Fasilitas Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana				0,00		0,00		14.495.408,00		14.495.408,00		14.495.408,00		
Terlaksananya Fasilitas Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai (Keluarga)	0	0	0,00	0	0,00	2	14.495.408,00	2	14.495.408,00	2	14.495.408,00		
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				60.000.000,00		63.000.000,00		66.150.000,00		69.457.500,00		72.930.375,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Cakupan Layanan Taman Makam Pahlawan (Persentase)	100	100	60.000.000,00	100	63.000.000,00	100	66.150.000,00	100	69.457.500,00	100	72.930.375,00	1.06.2.08.2.14.01.00 00 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1.06.07.2.01 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				60.000.000,00		63.000.000,00		66.150.000,00		69.457.500,00		72.930.375,00		
Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	60.000.000,00	1	63.000.000,00	1	66.150.000,00	1	69.457.500,00	1	72.930.375,00		
	Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Orang)	0	300		300		300		300		300			
1.06.07.2.01.0001 - Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				35.000.000,00		38.000.000,00		41.150.000,00		44.457.500,00		47.930.375,00		
Terlaksananya Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	35.000.000,00	1	38.000.000,00	1	41.150.000,00	1	44.457.500,00	1	47.930.375,00		
1.06.07.2.01.0005 - Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Orang)	0	300	25.000.000,00	300	25.000.000,00	300	25.000.000,00	300	25.000.000,00	300	25.000.000,00		
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				1.120.028.000,00		1.176.029.400,00		1.234.830.870,00		1.296.572.414,00		1.361.401.034,00		
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				270.000.000,00		283.500.000,00		297.675.000,00		312.558.750,00		328.186.688,00		
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	27	35	270.000.000,00	40	283.500.000,00	45	297.675.000,00	55	312.558.750,00	65	328.186.688,00	1.06.2.08.2.14.01.00 00 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	52,09	56,25		57,03		57,84		58,67		59,42			
2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				95.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00		99.000.000,00		105.000.000,00		
Terlaksananya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah	Jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	30	40	95.000.000,00	40	95.000.000,00	40	95.000.000,00	42	99.000.000,00	45	105.000.000,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG (Laporan)	1	1		1		1		1		1				
2.08.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00			
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00			
2.08.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00			
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan kab/ kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG (Laporan)	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00			
2.08.02.2.01.0014 - Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		44.000.000,00		50.000.000,00			
terlaksananya bimtek penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	30	40	40.000.000,00	40	40.000.000,00	40	40.000.000,00	42	44.000.000,00	45	50.000.000,00			
2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota				105.000.000,00		105.000.000,00		119.175.000,00		130.058.750,00		139.686.688,00			
Terlaksananya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi (Lembaga)	0	12	105.000.000,00	12	105.000.000,00	12	119.175.000,00	12	130.058.750,00	12	139.686.688,00			
	Jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan (Orang)	0	0		0		10		15		20				
	Jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (orang)	0	25		25		25		25		25				
2.08.02.2.02.0003 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi				80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00			
Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan bagi organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi kewenangan kab/ kota	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi (Lembaga)	0	12	80.000.000,00	12	80.000.000,00	12	80.000.000,00	12	80.000.000,00	12	80.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.02.2.02.0008 - Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (orang)	0	25	25.000.000,00	25	25.000.000,00	25	25.000.000,00	25	25.000.000,00	25	25.000.000,00		
2.08.02.2.02.0009 - Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				0,00		0,00		14.175.000,00		25.058.750,00		34.686.688,00		
Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan (Orang)	0	0	0,00	0	0,00	10	14.175.000,00	15	25.058.750,00	20	34.686.688,00		
2.08.02.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				70.000.000,00		83.500.000,00		83.500.000,00		83.500.000,00		83.500.000,00		
Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan terhadap Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2	2	70.000.000,00	2	83.500.000,00	2	83.500.000,00	2	83.500.000,00	2	83.500.000,00		
	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (dokumen)	0	0		1		1		1		1			
2.08.02.2.03.0007 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota				70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		
terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2	2	70.000.000,00	2	70.000.000,00	2	70.000.000,00	2	70.000.000,00	2	70.000.000,00		
2.08.02.2.03.0008 - penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota				0,00		13.500.000,00		13.500.000,00		13.500.000,00		13.500.000,00		
terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (dokumen)	0	0	0,00	1	13.500.000,00	1	13.500.000,00	1	13.500.000,00	1	13.500.000,00		
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				176.256.500,00		185.069.325,00		194.322.791,00		204.038.931,00		214.240.877,00		
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	176.256.500,00	100	185.069.325,00	100	194.322.791,00	100	204.038.931,00	100	214.240.877,00	1.06.2.08.2.14.01.00 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.08.03.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				0,00		8.812.825,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Terlaksananya Upaya yang dilakukan dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga)	0	0	0,00	1	8.812.825,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00				
2.08.03.2.01.0006 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota				0,00		8.812.825,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00				
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIP kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, serta Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga)	0	0	0,00	1	8.812.825,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00				
2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota				81.896.500,00		81.896.500,00		89.962.791,00		99.678.931,00		109.880.877,00				
Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	10	15	81.896.500,00	15	81.896.500,00	15	89.962.791,00	15	99.678.931,00	15	109.880.877,00				
	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	0	0		0		0		0		3					
	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	0	0		0		2		0		0					
	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkataten/Kota (Orang)	0	0		0		0		0		2					
	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	0	0		0		0		2		0					
	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	0	0		0		2		0		0					
	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	10	15		15		15		15		15					
2.08.03.2.02.0003 - &layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota&				0,00		0,00		4.000.000,00		0,00		0,00				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
&Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota&	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	0,00	0	0,00	2	4.000.000,00	0	0,00	0	0,00		
2.08.03.2.02.0004 - layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		12.984.377,00		
Tersedianya layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkataten/Kota (Orang)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	12.984.377,00		
2.08.03.2.02.0005 - layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		15.000.000,00		
Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	15.000.000,00		
2.08.03.2.02.0006 - layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				0,00		0,00		4.066.291,00		0,00		0,00		
Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	0,00	0	0,00	2	4.066.291,00	0	0,00	0	0,00		
2.08.03.2.02.0007 - layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		17.782.431,00		0,00		
Tersedianya layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	17.782.431,00	0	0,00		
2.08.03.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	10	15	25.000.000,00	15	25.000.000,00	15	25.000.000,00	15	25.000.000,00	15	25.000.000,00		
2.08.03.2.02.0009 - Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				56.896.500,00		56.896.500,00		56.896.500,00		56.896.500,00		56.896.500,00		
Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	10	15	56.896.500,00	15	56.896.500,00	15	56.896.500,00	15	56.896.500,00	15	56.896.500,00		
2.08.03.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				94.360.000,00		94.360.000,00		94.360.000,00		94.360.000,00		94.360.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan terhadap Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek (orang)	90	70	94.360.000,00	70	94.360.000,00	70	94.360.000,00	70	94.360.000,00	70	94.360.000,00		
	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	2.08.03.2.03.0008 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			69.360.000,00		69.360.000,00		69.360.000,00		69.360.000,00		69.360.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek (orang)	90	70	69.360.000,00	70	69.360.000,00	70	69.360.000,00	70	69.360.000,00	70	69.360.000,00		
2.08.03.2.03.0009 - Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (Dokumen)	0	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				17.028.000,00		17.879.400,00		18.773.370,00		19.712.039,00		20.697.640,00		
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak serta perlindungan perempuan dan anak	Cakupan Keluarga yang mendapat pembinaan peningkatan kapasitas kualitas hidup (KPM )	0	3	17.028.000,00	3	17.879.400,00	4	18.773.370,00	4	19.712.039,00	5	20.697.640,00	1.06.2.08.2.14.01.00 00 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.08.04.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				17.028.000,00		17.879.400,00		18.773.370,00		19.712.039,00		20.697.640,00		
Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan terhadap Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas (Lembaga)	0	1	17.028.000,00	1	17.879.400,00	1	18.773.370,00	1	19.712.039,00	1	20.697.640,00		
2.08.04.2.02.0007 - peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				17.028.000,00		17.879.400,00		18.773.370,00		19.712.039,00		20.697.640,00		
Terlaksananya peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas (Lembaga)	0	1	17.028.000,00	1	17.879.400,00	1	18.773.370,00	1	19.712.039,00	1	20.697.640,00		
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				20.000.000,00		21.000.000,00		22.050.000,00		23.152.500,00		24.310.125,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	0	100	20.000.000,00	100	21.000.000,00	100	22.050.000,00	100	23.152.500,00	100	24.310.125,00	1.06.2.08.2.14.01.00 00 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.08.05.2.01 - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				20.000.000,00		21.000.000,00		22.050.000,00		23.152.500,00		24.310.125,00		
Terlaksananya Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	0	1	20.000.000,00	1	21.000.000,00	1	22.050.000,00	1	23.152.500,00	1	24.310.125,00		
2.08.05.2.01.0003 - Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota				20.000.000,00		21.000.000,00		22.050.000,00		23.152.500,00		24.310.125,00		
Meningkatnya ketersediaan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	0	1	20.000.000,00	1	21.000.000,00	1	22.050.000,00	1	23.152.500,00	1	24.310.125,00		
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				235.000.000,00		246.750.000,00		259.087.500,00		272.041.875,00		285.643.969,00		
Terjaminnya pemenuhan hak anak secara komprehensif	Persentase Lembaga dalam pemenuhan Kualitas Hidup Anak yang meningkat kapasitasnya (%)	37	42	235.000.000,00	52	246.750.000,00	61	259.087.500,00	68	272.041.875,00	75	285.643.969,00	1.06.2.08.2.14.01.00 00 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.08.06.2.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				100.000.000,00		111.750.000,00		111.750.000,00		111.750.000,00		111.750.000,00		
Terlaksananya Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha	jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	50	100.000.000,00	55	111.750.000,00	55	111.750.000,00	55	111.750.000,00	55	111.750.000,00		
2.08.06.2.01.0004 - Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				100.000.000,00		111.750.000,00		111.750.000,00		111.750.000,00		111.750.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	50	100.000.000,00	55	111.750.000,00	55	111.750.000,00	55	111.750.000,00	55	111.750.000,00		
2.08.06.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				135.000.000,00		135.000.000,00		147.337.500,00		160.291.875,00		173.893.969,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan terhadap Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	0	40	135.000.000,00	40	135.000.000,00	42	147.337.500,00	45	160.291.875,00	45	173.893.969,00		
	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1		1		1		1					
2.08.06.2.02.0006 - penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		45.000.000,00		
Terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	45.000.000,00		
2.08.06.2.02.0009 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				100.000.000,00		100.000.000,00		112.337.500,00		125.291.875,00		128.893.969,00		
Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	0	40	100.000.000,00	40	100.000.000,00	42	112.337.500,00	45	125.291.875,00	45	128.893.969,00		
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				401.743.500,00		421.830.675,00		442.922.209,00		465.068.319,00		488.321.735,00		
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	100	100	401.743.500,00	100	421.830.675,00	100	442.922.209,00	100	465.068.319,00	100	488.321.735,00	1.06.2.08.2.14.01.00 00 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten (%)	100	100		100		100		100					
2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				102.000.000,00		102.000.000,00		102.000.000,00		102.000.000,00		102.000.000,00		
Terlaksananya upaya yang dilakukan dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota (Dokumen)	1	1	102.000.000,00	1	102.000.000,00	1	102.000.000,00	1	102.000.000,00	1	102.000.000,00		
2.08.07.2.01.0006 - koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota				102.000.000,00		102.000.000,00		102.000.000,00		102.000.000,00		102.000.000,00		
terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota (Dokumen)	1	1	102.000.000,00	1	102.000.000,00	1	102.000.000,00	1	102.000.000,00	1	102.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				229.743.500,00		229.743.500,00		250.835.034,00		272.981.144,00		284.234.560,00		
Tersedianya Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	229.743.500,00	0	229.743.500,00	2	250.835.034,00	2	272.981.144,00	2	284.234.560,00		
	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	0	0		0		2		2					
	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	0	0		0		0		2		3			
	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	32	40		40		40		40		40			
	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	0	0		0		2		2		2			
	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	0	0		0		0		2		3			
	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	31	40		40		40		40		40			
	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	0	0		0		2		2		2			
2.08.07.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	32	40	50.000.000,00	40	50.000.000,00	40	50.000.000,00	40	50.000.000,00	40	50.000.000,00		
2.08.07.2.02.0009 - layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		15.000.000,00		22.500.000,00		
Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	15.000.000,00	3	22.500.000,00		
2.08.07.2.02.0010 - layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		7.146.110,00		10.899.526,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	7.146.110,00	3	10.899.526,00		
2.08.07.2.02.0011 - layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				0,00		0,00		7.091.534,00		7.091.534,00		7.091.534,00		
layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	0,00	0	0,00	2	7.091.534,00	2	7.091.534,00	2	7.091.534,00		
2.08.07.2.02.0012 - layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				0,00		0,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		
Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	0,00	0	0,00	2	6.000.000,00	2	6.000.000,00	2	6.000.000,00		
2.08.07.2.02.0013 - Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				179.743.500,00		179.743.500,00		179.743.500,00		179.743.500,00		179.743.500,00		
Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	31	40	179.743.500,00	40	179.743.500,00	40	179.743.500,00	40	179.743.500,00	40	179.743.500,00		
2.08.07.2.02.0014 - layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				0,00		0,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		
Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	0,00	0	0,00	2	4.000.000,00	2	4.000.000,00	2	4.000.000,00		
2.08.07.2.02.0015 - layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				0,00		0,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		
Tersedianya layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	0,00	0	0,00	2	4.000.000,00	2	4.000.000,00	2	4.000.000,00		
2.08.07.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				70.000.000,00		90.087.175,00		90.087.175,00		90.087.175,00		102.087.175,00		
Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan terhadap Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	0	50	70.000.000,00	50	90.087.175,00	50	90.087.175,00	50	90.087.175,00	50	102.087.175,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota (Dokumen)	1	0		1		1		1		1			
	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak (Dokumen)	0	0		1		1		1		1			
2.08.07.2.03.0007 - Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota				0,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		12.000.000,00		
Terselenggaranya KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak (Dokumen)	0	0	0,00	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00	1	12.000.000,00		
2.08.07.2.03.0009 - koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota				0,00		13.087.175,00		13.087.175,00		13.087.175,00		20.087.175,00		
terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota (Dokumen)	1	0	0,00	1	13.087.175,00	1	13.087.175,00	1	13.087.175,00	1	20.087.175,00		
2.08.07.2.03.0013 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		
terlaksananya bimtek penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	0	50	70.000.000,00	50	70.000.000,00	50	70.000.000,00	50	70.000.000,00	50	70.000.000,00		
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				2.589.903.411,00		2.719.398.582,00		2.855.368.510,00		2.998.136.936,00		3.148.043.783,00		
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				141.800.000,00		148.890.000,00		156.334.500,00		164.151.225,00		172.358.786,00		
Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun (Rata-rata Anak per Wanita)	2,22	2,20	141.800.000,00	2,19	148.890.000,00	2,18	156.334.500,00	2,17	164.151.225,00	2,16	172.358.786,00	1.06.2.08.2.14.01.00 00 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	13,3	10.8-10.2		9.9-9.5		9.3-9.0		8.9-8.7		8.5-8.3			
2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				80.000.000,00		60.000.000,00		67.444.500,00		75.261.225,00		83.468.786,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	80.000.000,00	1	60.000.000,00	1	67.444.500,00	1	75.261.225,00	1	83.468.786,00		
	Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga (Kegiatan)	9	0		9		9		9		9			
	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal (Satuan Pendidikan)	1	0		0		1		1		1			
2.14.02.2.01.0017 - Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga				0,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga (Kegiatan)	9	0	0,00	9	20.000.000,00	9	20.000.000,00	9	20.000.000,00	9	20.000.000,00		
2.14.02.2.01.0025 - Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota				80.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Terlaksananya Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	80.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00		
2.14.02.2.01.0027 - Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal				0,00		0,00		7.444.500,00		15.261.225,00		23.468.786,00		
Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal (Satuan Pendidikan)	1	0	0,00	0	0,00	1	7.444.500,00	1	15.261.225,00	1	23.468.786,00		
2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				61.800.000,00		88.890.000,00		88.890.000,00		88.890.000,00		88.890.000,00		
Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	1	0	61.800.000,00	1	88.890.000,00	1	88.890.000,00	1	88.890.000,00	1	88.890.000,00		
	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
2.14.02.2.02.0012 - Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				0,00		27.090.000,00		27.090.000,00		27.090.000,00		27.090.000,00		
Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	1	0	0,00	1	27.090.000,00	1	27.090.000,00	1	27.090.000,00	1	27.090.000,00		
2.14.02.2.02.0013 - Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				61.800.000,00		61.800.000,00		61.800.000,00		61.800.000,00		61.800.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	1	1	61.800.000,00	1	61.800.000,00	1	61.800.000,00	1	61.800.000,00	1	61.800.000,00			
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				640.527.711,00		672.554.097,00		706.181.801,00		741.490.891,00		778.565.436,00			
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	67,70	72,15	640.527.711,00	74,46	672.554.097,00	76,65	706.181.801,00	78,40	741.490.891,00	80,05	778.565.436,00	1.06.2.08.2.14.01.00 00 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	6,5	6,1		5,8		5,3		4,9		4,5				
2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal				212.250.000,00		217.250.000,00		237.250.000,00		237.250.000,00		252.250.000,00			
Terlaksananya Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	0	0	212.250.000,00	1	217.250.000,00	1	237.250.000,00	1	237.250.000,00	4	252.250.000,00			
	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)	18	0		0		1		1		1				
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK (Laporan)	2	0		0		1		1		1				
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	9	9		9		9		9		9				
	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1		
2.14.03.2.01.0008 - Pengendalian Program KKBPK				0,00		0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00			
Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK (Laporan)	2	0	0,00	0	0,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00			
2.14.03.2.01.0010 - Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana				135.000.000,00		135.000.000,00		135.000.000,00		135.000.000,00		135.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	9	9	135.000.000,00	9	135.000.000,00	9	135.000.000,00	9	135.000.000,00	9	135.000.000,00		
2.14.03.2.01.0011 - Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				0,00		0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)	18	0	0,00	0	0,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
2.14.03.2.01.0013 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal				77.250.000,00		77.250.000,00		77.250.000,00		77.250.000,00		77.250.000,00		
Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen)	1	1	77.250.000,00	1	77.250.000,00	1	77.250.000,00	1	77.250.000,00	1	77.250.000,00		
2.14.03.2.01.0014 - Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				0,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	0	0	0,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	4	20.000.000,00		
2.14.03.2.02 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				155.195.711,00		155.195.711,00		155.195.711,00		175.504.801,00		182.579.346,00		
Meningkatnya Peran Serta Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) dalam Pembinaan Keluarga Berencana	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia (Unit)	9	7	155.195.711,00	7	155.195.711,00	7	155.195.711,00	7	175.504.801,00	7	182.579.346,00		
	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	303	0		0		0		10		13			
2.14.03.2.02.0002 - Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB				155.195.711,00		155.195.711,00		155.195.711,00		155.195.711,00		155.195.711,00		
Tersedianya Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia (Unit)	9	7	155.195.711,00	7	155.195.711,00	7	155.195.711,00	7	155.195.711,00	7	155.195.711,00		
2.14.03.2.02.0004 - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				0,00		0,00		0,00		20.309.090,00		27.383.635,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	303	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	20.309.090,00	13	27.383.635,00		
2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota				273.082.000,00		273.082.000,00		286.709.704,00		301.709.704,00		301.709.704,00		
Terpenuhinya Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta terlaksananya Pelayanan KB di Daerah	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (Orang)	2	0	273.082.000,00	0	273.082.000,00	3	286.709.704,00	3	301.709.704,00	3	301.709.704,00		
	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya (Laporan)	13	13		13		13		13		13			
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya (Laporan)	13	13		13		13		13		13			
	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit)	1	0		0		0		1		1			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	943	703		703		703		703		703			
2.14.03.2.03.0001 - Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya				11.700.000,00		11.700.000,00		11.700.000,00		11.700.000,00		11.700.000,00		
Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya (Laporan)	13	13	11.700.000,00	13	11.700.000,00	13	11.700.000,00	13	11.700.000,00	13	11.700.000,00		
2.14.03.2.03.0003 - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				245.782.000,00		245.782.000,00		245.782.000,00		245.782.000,00		245.782.000,00		
Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	943	703	245.782.000,00	703	245.782.000,00	703	245.782.000,00	703	245.782.000,00	703	245.782.000,00		
2.14.03.2.03.0006 - Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB				0,00		0,00		0,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit)	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00		
2.14.03.2.03.0008 - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya				15.600.000,00		15.600.000,00		15.600.000,00		15.600.000,00		15.600.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	13	13	15.600.000,00	13	15.600.000,00	13	15.600.000,00	13	15.600.000,00	13	15.600.000,00		
2.14.03.2.03.0010 - Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi				0,00		0,00		13.627.704,00		13.627.704,00		13.627.704,00		
Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (Orang)	2	0	0,00	0	0,00	3	13.627.704,00	3	13.627.704,00	3	13.627.704,00		
2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan Ber-KB				0,00		27.026.386,00		27.026.386,00		27.026.386,00		42.026.386,00		
Meningkatnya Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan Ber-KB	Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit)	0	0	0,00	1	27.026.386,00	1	27.026.386,00	1	27.026.386,00	1	42.026.386,00		
	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	101	0		13		13		13		25			
2.14.03.2.04.0005 - Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas				0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit)	0	0	0,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
2.14.03.2.04.0006 - Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas				0,00		17.026.386,00		17.026.386,00		17.026.386,00		32.026.386,00		
Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	101	0	0,00	13	17.026.386,00	13	17.026.386,00	13	17.026.386,00	25	32.026.386,00		
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				1.807.575.700,00		1.897.954.485,00		1.992.852.209,00		2.092.494.820,00		2.197.119.561,00		
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Presentase)	17	26	1.807.575.700,00	34	1.897.954.485,00	41	1.992.852.209,00	49	2.092.494.820,00	57	2.197.119.561,00	1.06.2.08.2.14.01.00 00 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				1.807.575.700,00		1.857.954.485,00		1.952.852.209,00		2.002.494.820,00		2.107.119.561,00		
Terlaksananya Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Aksesor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	20	0	1.807.575.700,00	2	1.857.954.485,00	3	1.952.852.209,00	5	2.002.494.820,00	7	2.107.119.561,00		
	Jumlah laporan Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Laporan)	0	0		1		1		1		1			
	Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia (Kegiatan)	1	0		0		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Orang)	0	0		10		25		25		30			
	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Aksesor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Orang)	741	741		741		741		741		741			
	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelathan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Aksesor (UPPKA) (Orang)	35	150		150		150		150		150			
	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Aksesor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Kelompok)	0	0		2		4		8		12			
	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	0	2		2		2		2		2			
	2.14.04.2.01.0015 - Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL						0,00				0,00			
Terlaksananya aktifitas lansia sesuai tujuan dimensi lansia tangguh dalam mewujudkan lansia yang Sehat, Mandiri, Aktif dan Produktif	Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia (Kegiatan)	1	0	0,00	0	0,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14.04.2.01.0017 - Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))				92.571.750,00		92.571.750,00		92.571.750,00		92.571.750,00		97.196.491,00		
Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	0	2	92.571.750,00	2	92.571.750,00	2	92.571.750,00	2	92.571.750,00	2	97.196.491,00		
2.14.04.2.01.0018 - Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				0,00		20.000.000,00		30.000.000,00		50.000.000,00		70.000.000,00		
Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	20	0	0,00	2	20.000.000,00	3	30.000.000,00	5	50.000.000,00	7	70.000.000,00		
2.14.04.2.01.0019 - Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				84.803.950,00		84.803.950,00		84.803.950,00		84.803.950,00		84.803.950,00		
Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) (Orang)	35	150	84.803.950,00	150	84.803.950,00	150	84.803.950,00	150	84.803.950,00	150	84.803.950,00		
2.14.04.2.01.0020 - Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)				0,00		10.000.000,00		34.897.724,00		34.897.724,00		44.897.724,00		
Terlaksananya Advokasi dan Promosi Bangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Orang)	0	0	0,00	10	10.000.000,00	25	34.897.724,00	25	34.897.724,00	30	44.897.724,00		
2.14.04.2.01.0024 - Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				1.630.200.000,00		1.630.200.000,00		1.630.200.000,00		1.630.200.000,00		1.680.200.000,00		
Tersedianya biaya operasional bagi kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Orang)	741	741	1.630.200.000,00	741	1.630.200.000,00	741	1.630.200.000,00	741	1.630.200.000,00	741	1.680.200.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14.04.2.01.0026 - Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				0,00		10.000.000,00		20.000.000,00		40.000.000,00		60.000.000,00		
Tersedianya biaya operasional bagi kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Kelompok)	0	0	0,00	2	10.000.000,00	4	20.000.000,00	8	40.000.000,00	12	60.000.000,00		
2.14.04.2.01.0029 - Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)				0,00		10.378.785,00		30.378.785,00		40.021.396,00		40.021.396,00		
Terlaksananya Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Jumlah laporan Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Laporan)	0	0	0,00	1	10.378.785,00	1	30.378.785,00	1	40.021.396,00	1	40.021.396,00		
2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				0,00		40.000.000,00		40.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan)	9	0	0,00	9	40.000.000,00	9	40.000.000,00	9	90.000.000,00	9	90.000.000,00		
	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	9	0		9		9		9		9			
2.14.04.2.02.0005 - Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				0,00		20.000.000,00		20.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan)	9	0	0,00	9	20.000.000,00	9	20.000.000,00	9	40.000.000,00	9	40.000.000,00		
2.14.04.2.02.0006 - Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				0,00		20.000.000,00		20.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	9	0	0,00	9	20.000.000,00	9	20.000.000,00	9	50.000.000,00	9	50.000.000,00		

## 2. Subkegiatan Prioritas Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Tabel 4.2  
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas  
Pembangunan Daerah

NO.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya pemberdayaan sosial	1.06.02.2.01 - Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	
			1.06.02.2.01.0002 - Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	
			1.06.02.2.01.0004 - Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT yang terpadu dan berkelanjutan	
			1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
			1.06.02.2.03.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
			1.06.02.2.03.0014 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			1.06.02.2.03.0017 - Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
2	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya rehabilitasi sosial	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
			1.06.04.2.01.0001 - Penyediaan Permakanan	

NO.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
			1.06.04.2.01.0002 - Penyediaan Sandang	
			1.06.04.2.01.0003 - Penyediaan Alat Bantu	
			1.06.04.2.01.0004 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
			1.06.04.2.01.0005 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
			1.06.04.2.01.0006 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	
			1.06.04.2.01.0008 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
			1.06.04.2.01.0009 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	
			1.06.04.2.01.0010 - Pemberian Layanan Kedaruratan	
			1.06.04.2.01.0011 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
			1.06.04.2.01.0012 - Pemberian Layanan Rujukan	
			1.06.04.2.01.0014 - Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	
			1.06.04.2.01.0016 - Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	
			1.06.04.2.01.0017 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan	

NO.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
			1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
			1.06.04.2.02.0013 - Pemberian Layanan Rujukan	
3	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	1.06.05.2.01 - Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	
			1.06.05.2.01.0002 - Rujukan Anak-Anak Terlantar	
			1.06.05.2.01.0004 - Fasilitasi Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	
			1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			1.06.05.2.02.0001 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			1.06.05.2.02.0004 - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	
			1.06.05.2.02.0008 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
4	1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
			1.06.06.2.01.0001 - Penyediaan Makanan	
			1.06.06.2.01.0002 - Penyediaan Sandang	
			1.06.06.2.01.0004 - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	
			1.06.06.2.01.0005 - Pelayanan Dukungan Psikososial	

NO.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
5	2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran Perempuan dalam pembangunan	1.06.06.2.01.0007 - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	
			1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
			1.06.06.2.02.0002 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	
			2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	
			2.08.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.02.2.01.0014 - Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.02.2.02.0003 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	
			2.08.02.2.02.0008 - Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.02.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	

NO.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
			2.08.02.2.03.0007 - Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	
6	2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	2.08.03.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
			2.08.03.2.01.0006 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.03.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			2.08.03.2.02.0009 - Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			2.08.03.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			2.08.03.2.03.0008 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.03.2.03.0009 - Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	

NO.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
7	2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak serta perlindungan perempuan dan anak	2.08.04.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			2.08.04.2.02.0007 - Peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
8	2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	2.08.05.2.01 - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			2.08.05.2.01.0003 - Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	
9	2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Terjaminnya pemenuhan hak anak secara Komprehensif	2.08.06.2.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.06.2.01.0004 - Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.06.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.06.2.02.0009 - Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
10	2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran,	2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	



NO.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
		perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	2.08.07.2.01.0006 - Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	
			2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			2.08.07.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			2.08.07.2.02.0013 - Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			2.08.07.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			2.08.07.2.03.0013 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
11	2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Terkendalinya jumlah penduduk pertambahan	2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	
			2.14.02.2.01.0025 - Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	
			2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			2.14.02.2.02.0013 - Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	

NO.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
12	2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
			2.14.03.2.01.0008 - Pengendalian Program KKBPK	
			2.14.03.2.01.0010 - Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	
			2.14.03.2.01.0013 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	
			2.14.03.2.02 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	
			2.14.03.2.02.0002 - Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	
			2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
			2.14.03.2.03.0001 – Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
			2.14.03.2.03.0003 - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	
			2.14.03.2.03.0008 - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	

NO.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
			2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
			2.14.03.2.04.0006 - Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	
13	2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
			2.14.04.2.01.0017 - Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	
			2.14.04.2.01.0018 - Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	
			2.14.04.2.01.0019 - Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	
			2.14.04.2.01.0020 - Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	
			2.14.04.2.01.0024 - Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	

NO.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
			2.14.04.2.01.0029 - Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	
			2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
			2.14.04.2.02.0005 - Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	
			2.14.04.2.02.0006 - Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	

### **3. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi dimana setiap Instansi Pemerintah dan Organisasi Perangkat Daerah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing. Adapun tujuan penetapan indikator kinerja utama adalah :

- a) Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja yang baik;
- b) Untuk memperoleh keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah harus selaras antar Tingkat unit organisasi sehingga dalam pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama harus mempertimbangkan beberapa hal berikut, yaitu :

- a) Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah, Rencana Strategis, kebijakan umum dan atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
- b) Bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta peran lainnya;
- c) Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
- d) Kebutuhan data statistik pemerintah;
- e) Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan instansi pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB No. 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah adalah untuk:

- 1) Perencanaan Jangka Menengah;
- 2) Perencanaan Tahunan;
- 3) Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja;
- 4) Pelaporan Akuntabilitas Kinerja;
- 5) Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- 6) Pemantauan dan pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan kegiatan.

Berdasarkan beberapa uraian diatas, adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3  
Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN KE-						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	Keluarga	30	34	40	48	58	65	
2	Persentase PPKS Yang Tertangani	%	93	94	95	95	95	95	
3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	87,78	88,06	88,34	88,62	88,91	89,04	
4	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.00 penduduk perempuan)	%	8,43	8,15	7,84	7,46	7,05	6,58	
5	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	64,14	65,36	66,57	67,79	69,05	70,33	
6	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	%	88,6	89,1	89,5	89,9	90,3	90,7	
7	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri	%	48,5	49,4	50,4	51,3	52,5	53,3	
8	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,34	72,57	73,76	74,93	76,12	77,32	

#### **4. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)**

Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan Gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Sosial, Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4  
Indikator Kinerja Kunci (IKK)

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN KE-						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<i>Urusan Pemerintahan Bidang Sosial</i>								
1	Persentase Penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut usia terlantar dan Gelandangan pengemis yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	%	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	%	100	100	100	100	100	100	
	<i>Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</i>								
1	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	%	30	35	40	45	55	65	
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instasi terkait kabupaten	%	100	100	100	100	100	100	
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.00 penduduk perempuan)	%	8,43	8,15	7,84	7,46	7,05	6,58	



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN KE-						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	<i>Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</i>								
1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Rata-rata Anak per Wanita	2,21	2,20	2,19	2,18	2,17	2,16	
2	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	%	70,23	72,15	74,46	76,65	78,4	80,05	
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	6,3	6,1	5,8	5,3	4,9	4,5	

Selain Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, ditetapkan pula Indikator Kinerja berdasarkan penyelenggaraan bidang urusan sesuai Tugas dan Fungsi yang telah di tetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kinerja Pemerintah Daerah.

Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat ditampilkan, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum daerah bersangkutan. Untuk lebih jelasnya terkait dengan Indikator Kinerja Menurut Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.5  
Indikator Kinerja Bidang Urusan Penyelenggaraan  
Pemerintah Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN KE-						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<i>Urusan Pemerintahan Bidang Sosial</i>								
1	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial	%	65	70	75	80	85	90	
2	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	96,43	96,92	97,47	97,96	98,46	98,91	
	<i>Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</i>								
1	Persentase partisipasi perempuan di Lembaga pemerintah	%	12,23	13,01	13,82	14,65	15,47	16,29	
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	%	26,67	26,67	26,67	26,67	26,67	30,00	
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	41,67	42,54	43,44	44,37	45,21	46,15	
4	Rasio KDRT	%	0,014	0,012	0,012	0,010	0,010	0,008	
5	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN KE-						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	100	100	100	100	100	100	
7	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100	100	
8	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	100	100	100	100	100	
9	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	100	100	100	100	100	100	
10	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100	100	100	100	
11	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN KE-						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	<i>Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</i>								
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	0,95	0,93	0,91	0,89	0,87	0,85	
2	Indeks Lansia Berdaya	Indeks	58,5	58,9	59,4	59,8	60,2	60,6	
3	Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja	Indeks	85,4	86,5	87,5	88,4	89,3	90,2	
4	Ratio Akseptor KB	%	65,80	66,43	66,82	67,47	67,85	68,26	
5	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49 tahun	%	65,80	66,43	66,82	67,47	67,85	68,26	
6	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	%	0,07	0,07	0,06	0,06	0,05	0,04	
7	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	17,75	18,80	19,82	20,96	21,04	22,24	
8	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	65,35	66,47	67,53	66,68	67,72	68,89	
9	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	38,45	41,65	43,02	47,54	50,27	53,64	
10	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	7,32	8,56	9,85	10,94	12,02	13,35	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN KE-						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
11	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	
12	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	%	6,45	6,56	6,62	6,77	6,85	6,93	
13	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	100	100	100	100	100	100	
14	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	%	4,53	5,49	6,57	7,42	8,55	9,60	
15	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	Rasio	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	
16	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	
17	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi	%	75	75	79	83	88	92	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN KE-						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	pelayanan								
18	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	93,62	94,01	94,54	95,07	96,68	97,16	
19	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Angka	22,60	22,80	23,10	23,40	23,70	24,00	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah, sehingga Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini disusun dengan mengacu pada RPJMD 2025-2029 yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Secara umum, kerangka logis yang dibangun dalam Renstra ini merupakan sebuah upaya untuk memberikan kontribusi secara langsung dan terukur untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2025-2029. Salah satu acuan yang paling mendasar dalam penyusunan Renstra ini adalah “Prioritas Daerah untuk meningkatkan Perlindungan Sosial yang adaptif serta meningkatkan keluarga berkualitas dan kesetaraan gender”

Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana disusun dengan memperhatikan kerangka waktu dalam pencapaian sasaran program/kegiatan prioritas, baik selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, maupun di setiap tahunnya (program/kegiatan jangka pendek/ tahunan).

Agar implementasi dapat berjalan dengan baik, perlu disusun kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- 1) Renstra sebagai dokumen perencanaan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen perencanaan program dan kegiatan tahunan, dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebagai dokumen anggaran tahunan.
- 2) Pencapaian tujuan dan sasaran strategis Renstra diarahkan oleh Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta dilaksanakan oleh seluruh jajaran pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah hukum serta prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.



- 3) Target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra akan dijadikan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi, pengukuran dan pelaporan kinerja sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- 4) Pengendalian dan Evaluasi Renstra dilakukan secara obyektif dan periodik, serta terintegrasi dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja. Pada akhir periode Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (tahun 2029) dilaksanakan evaluasi akhir Renstra 2025-2029, sekaligus sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Strategis periode selanjutnya.
- 5) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra dilakukan secara berjenjang mulai dari unit kerja terendah hingga Kepala Dinas, dan dikoordinasikan oleh Sekretariat Dinas.

Pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra tahun 2025-2029 harus didukung dengan komitmen dan kerja keras dari seluruh jajaran pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta dukungan dari seluruh stakeholder terkait, unsur akademisi, masyarakat, dan dunia usaha. Dengan komitmen dan kerja sama yang dibangun, diharapkan Kesejahteraan Sosial yang inklusif, Pembangunan Keluarga yang berkualitas serta kesetaraan gender di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat terwujud.